



FEBUNMUL

MODUL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

**Penulis:
Jamaluddin
Dwi Risma Deviyanti**

**Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman**



MODUL

AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Penulis:
Jamaluddin
Dwi Risma Deviyanti

Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Mulawarman

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena Rahmat dan TaufiqNyalah sehingga aktivitas keseharian dapat diselesaikan. Sholawat dan Salam penulis kirimkan kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai contoh teladan yang terbaik.

Modul pembelajaran Akuntansi Sektor Publik ini diperuntukan untuk mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman yang sedang menempuh mata kuliah di semester 3. Modul ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam mempelajari Akuntansi Sektor Publik secara mandiri. Hal ini sangat membantu mengingat saat ini masih dilakukan kuliah secara daring akibat penyebaran covid-19. Walaupun nantinya kuliah dilakukan secara luring modul ini tetap dapat digunakan sebagai acuan dalam proses belajar mengajar mata kuliah Akuntansi Sektor Publik.

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga modul ini dapat diselesaikan, khususnya kepada pihak Universitas Mulawarman Rektor, Para Wakil Rektor dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Wakil Dekan, Ketua Jurusan Akuntansi dan Prodi Akuntansi yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun modul ini.

Sebagai penutup, penulis memohon kepada ampun kepada Allah SWT jika atas kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan modul ini. Selanjutnya permohonan maaf kepada semua pihak, jika ada hal-hal terdapat hal-hal yang mungkin belum sempurna dalam penulisan ini. Akhirul kalam, semoga Allah SWT meridhai usaha kita, dan senantiasa mendapatkan perlindungan Allah SWT. Aamiin Ya Rabbul Aalamiin.

Samarinda, Nopember 2021

Penulis

Jamaluddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PETA KEDUDUKAN MODUL	xi
GLOSARIUM	xii
MODUL PEMBELAJARAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	
BAB 1 PENDAHULUAN	1
Deskripsi Mata Kuliah	1
Prasyarat	2
Petunjuk Penggunaan Modul	2
Penjelasan Bagi Mahasiswa	3
Peran Dosen	3
Tujuan Akhir	3
Kompetensi	4
Cek Kemampuan	4
BAB 2 PEMBELAJARAN	5
A. Rencana Belajar	5
B. Kegiatan Belajar	5
1. Kegiatan Belajar 1	
GAMBARAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK	6
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran	6
b. Uraian Materi	6
1. Apa itu Akuntansi Sektor Publik	6
2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik	7
3. Apa itu Organisasi Sektor Publik	7
4. Perbedaan dan Persamaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta	8

5. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik dan Perkembangannya	9
6. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia	9
7. Barang dan Jasa Publik	10
8. Apa Profesi Akuntansi Sektor Publik?	10
c. Rangkuman	11
d. Tugas	12
e. Tes Formatif	12
f. Kunci Jawaban	12

2. Kegiatan Belajar 2

REGULASI DAN PERKEMBANGANNYA DALAM RUANG

SEKTOR PUBLIK	14
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran	14
b. Uraian Materi	14
c. Definisi Regulasi Publik	14
1. Teknik Penyusunan Regulasi Publik	14
2. Kebutuhan Regulasi dan Standar di Sektor Publik	14
3. Perkembangan Regulasi di Sektor Publik	14
4. Perkembangan Regulasi di Sektor Publik	15
5. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)	18
d. Rangkuman	21
e. Tugas	22
f. Tes Formatif	22
g. Kunci Jawaban	22

3. Kegiatan Belajar 3

RERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK . . .

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran	24
b. Uraian Materi	24
1. Definisi Rerangka Konseptual ASP	24
2. Tujuan dan Peranan Rerangka Konseptual ASP	25
3. Lingkup Rerangka Konseptual ASP	25

4. Elemen Laporan Keuangan Sektor Publik	26
5. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik	26
6. Akuntansi Berbasis Kas VS Berbasis AkruaI dan Modifikasinya	27
c. Rangkuman	28
d. Tugas	29
e. Tes Formatif	29
f. Kunci Jawaban	29
4. Kegiatan Belajar 4	
AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK	31
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran	31
b. Uraian Materi	31
1. Definisi Akuntansi Manajemen Sektor Publik	31
2. Peran Perencanaan	31
3. Informasi Sebagai Alat Perencanaan	31
4. Peran Pengendalian	32
5. Peran Akuntansi Manajemen Sektor Publik	32
6. Perencanaan Strategi	33
7. Pengendalian Manajemen Sektor Publik	33
c. Rangkuman	33
d. Tugas	34
e. Tes Formatif	34
f. Kunci Jawaban	35
5. Kegiatan Belajar 5	
ANGGARAN SEKTOR PUBLIK	37
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran	37
b. Uraian Materi	37
1. Teori Penganggaran Publik	37
2. Sistem Penganggaran Publik	37
3. Tradisional Budgeting System	38
4. Performance Budgeting System	38

5. Planning Programming Budgeting System (PPBS)	38
6. Siklus Penganggaran Publik	39
7. Teknik Penganggaran Publik	39
8. Penganggaran Publik di Berbagai Negara Maju dan Berkembang	42
9. Implementasi Pembaharuan di Negera-Negera Berkembang	43
c. Rangkuman	44
d. Tugas	45
e. Tes Formatif	45
f. Kunci Jawaban	45
6. Kegiatan Belajar 6	
RENCANA PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN PEMERINTAH ..	47
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran	47
b. Uraian Materi	47
1. Rencana Pembangunan Pemerintah	47
2. Penyusunan Anggaran APBN	48
3. Penyusunan APBD	52
c. Rangkuman	55
d. Tugas	56
e. Tes Formatif	56
f. Kunci Jawaban	57
7. Kegiatan Belajar 7	
TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK	59
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran	59
b. Uraian Materi	59
1. Akuntansi Anggaran	59
2. Akuntansi Komitemen	60
3. Akuntansi Dana	61
4. Akuntansi Kas	62
5. Akuntansi AkruaI	63

c.	Rangkuman	64
d.	Tugas	65
e.	Tes Formatif	65
f.	Kunci Jawaban	66
8.	Kegiatan Belajar 8	
	UJIAN TENGAH SEMESTER	67
a.	Tujuan Kegiatan Pembelajaran	67
b.	Uraian Materi	67
1.	Petunjuk Ujian Tengah Semester	67
2.	Soal Ujian Tengah Semester	67
9.	Kegiatan Belajar 9	
	LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK (Bagian 1)	68
a.	Tujuan Kegiatan Pembelajaran	68
b.	Uraian Materi	68
1.	Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik	68
2.	Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik	69
3.	Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik	71
c.	Rangkuman	72
d.	Tugas	74
e.	Tes Formatif	75
f.	Kunci Jawaban	75
10.	Kegiatan Belajar 10	
	LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK (Bagian 2)	76
a.	Tujuan Kegiatan Pembelajaran	76
b.	Uraian Materi	76
1.	Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Swasta ..	76
2.	Dampak Laporan Keuangan Sektor Publik.	77
3.	Bentuk-Bentuk Laporan Keuangan	77
c.	Rangkuman	78
d.	Tugas	80

e. Tes Formatif	80
f. Kunci Jawaban	80

11. Kegiatan Belajar 11

PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK	81
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran	81
b. Uraian Materi	81
1. Pengertian dan Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik . .	81
2. Pengukuran Kinerja	82
3. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja Sektor Publik	82
4. Informasi Yang Digunakan Untuk Mengukur Kinerja sektor Publik	83
5. Peran Indikator Dalam Pengukuran Kinerja Sektor Publik . .	85
c. Rangkuman	85
d. Tugas	86
e. Tes Formatif	87
f. Kunci Jawaban	87

12. Kegiatan Belajar 12

AKUNTANSI DESA	89
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran	89
b. Uraian Materi	89
1. Gambaran Umum Pemerintah Desa	89
2. Pengertian Keuangan Desa	91
3. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa	91
4. Asas Keuangan Desa	92
5. Pengelolaan Keuangan Desa	92
6. Laporan Keuangan Desa	93
7. Pembuatan Anggaran dan Proposal Dusun	93
c. Rangkuman	94
d. Tugas	94
e. Tes Formatif	95
f. Kunci Jawaban	95

13. Kegiatan Belajar 13

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT	96
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran	96
b. Uraian Materi	96
1. Seluk Beluk Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	96
2. Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	96
3. Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	97
4. Ciri-Ciri Khusus Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	97
5. Rerangka Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat	98
6. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	99
c. Rangkuman	103
d. Tugas	104
e. Tes Formatif	104
f. Kunci Jawaban	105

14. Kegiatan Belajar 14

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH	106
a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran	106
b. Uraian Materi	106
1. Seluk Beluk Akuntansi Keuangan Daerah	106
2. Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah	107
3. Dasar Akuntansi	108
4. Akuntansi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah	108
5. Karakteristik Laporan Keuangan	109
6. Langkah-Langkah Praktik Keuangan	110
c. Rangkuman	113
d. Tugas	114
e. Tes Formatif	114
f. Kunci Jawaban	114

15. Kegiatan Belajar 15

AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA	116
---	-----

a.	Tujuan Kegiatan Pembelajaran	116
b.	Uraian Materi	116
	1. SELUK BELUK ORGANISASI NIRLABA	116
	1.1. Pengertian Organisasi	116
	1.2. Pengertian Organisasi Nirlaba	117
	1.3. Karakteristik Organisasi Nirlaba	117
	1.4. Organisasi Nirlaba di Indonesia	118
	2. LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA	119
	2.1. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba	120
	2.2. Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba	121
	3. Organisasi Nirlaba – Contoh Kasus	121
	4. Bentuk Pengelolaan Keuangan pada Lembaga Masjid	122
c.	Rangkuman	123
d.	Tugas	124
e.	Tes Formatif	125
f.	Kunci Jawaban	125
16.	Kegiatan Belajar 16.	
	UJIAN AKHIR SEMESTER	126
a.	Tujuan Kegiatan Pembelajaran	126
b.	Uraian Materi	126
	1. Petunjuk Ujian Akhir Semester	126
	2. Soal Ujian Akhir	126
	BAB 3 EVALUASI DAN PENUTUP	128
a.	Evaluasi	128
b.	Penutup	128
	DAFTAR PUSTAKA	130

PETA KEDUDUKAN MODUL

Modul Pembelajaran Akuntansi Sektor Publik ini digunakan di semester 3. Penempatan di semester 3 dimaksudkan agar mahasiswa menempuh mata kuliah ini telah selesai menempuh mata kuliah Pengantar Mata Kuliah Pengantar Akuntansi 1 dan mata kuliah Pengantar Akuntansi 2. Diasumsikan bahwa mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah telah mempunyai kemampuan dasar dalam menyusun laporan keuangan, mulai dari analisis transaksi, melakukan penjurnalan, posting ke buku besar, menyusun neraca lajur dan menyusun laporan keuangan serta melakukan jurnal balik. Pemahaman ini penting karena tataran di sektor publik sudah masuk ke tahapan aplikatif yang jika basic ilmu akuntansi belum dipahami akan mengalami kesulitan di Akuntansi Sektor Publik.

GLOSARIUM

ASP	: Akuntansi Sektor Publik
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APB-Des	: Anggaran Pendapatan Belanja Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BHP	: Badan Hukum Pendidikan
BLU	: Badan Layanan Umum
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan Negara
BUD	: Bendera Umum Daerah
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
GAAP	: <i>Generally Accepted Accounting Principle</i>
GASB	: <i>Governmental Accounting Standard Board</i>
HAM	: Hak Asasi Manusia
<i>IFR</i>	: <i>Internal Financial Reporting</i>
IAI	: Ikatan Akuntan Indonesia
IPB	: Institut Pertanian Bogor
ITB	: Institut Teknologi Bandung
KASP	: Komite Standa Akuntansi Pemerintahan
LAK	: Laporan Arus Kas
LHP	: Laporan Hasil Pemeriksaan
LKPD	: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MP3PEI	: <i>Masterplan</i> Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia

MWA	: Majelis Wali Amanat
NCGA	: <i>National Committee on Government Accounting</i>
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
OPKD	: Organisasi Pengelola Keuangan Daerah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PSC	: <i>Public Safety Center</i>
PP	: Peraturan Pemerintah
PPBS	: <i>Planning Program Budgeting System</i>
PPK	: Pejabat Pengelola Keuangan
PPKD	: Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
PPKSKPD	: Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah
PSAK	: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
RAPBD	: Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
RAPBN	: Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara
RCB	: <i>Rationalization Des Choix Budgetires/Rationalization of the Budget Chise</i>
RPJN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
SA	: Senat Akademik
SA-BAPP	: Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
SA-BUN	: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SA-BL	: Sistem Akuntansi Badan Lainnya
SA-IP	: Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAKSP	: Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik
SAKUN	: Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintah
SA-PP	: Sistem Akuntansi- Penerusan Pinjaman

SAPP	: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SA-TD	: Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAU	: Sistem Akuntansi Umum
SA-UP&H	: Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah
SIAP	: Sistem Akuntansi Pusat
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPKN	: Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
UAS	: Ujian Akhir Semester
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UI	: Universitas Indonesia
UNMUL	: Universitas Mulawarman
UPI	: Universitas Pendidikan Indonesia
USU	: Universitas Sumatera Utara
UTS	: Ujian Tengah Semester
UU	: Undang-Undang
ZBB	: <i>Zero-Based Budgeting</i>

BAB 1

PENDAHULUAN

Deskripsi Mata Kuliah

Akuntansi sektor publik merupakan suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga publik. Lembaga publik yang dimaksudkan di sini adalah lembaga yang tidak berorientasi mencari laba. Lembaga tersebut bisa lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Didirikan dan dioperasikan oleh pemerintah maupun swasta selama atas nama publik. Hal ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan ini seyogyanya dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Pengertian akuntansi untuk sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Laporan keuangan ini sebagai suatu masukan bagi pengambil keputusan selain informasi lain yang diperlukan.

Biasanya, proses pengklasifikasian dan analisis laporan pengelolaan keuangan yang dilakukan sektor publik berbeda dengan proses yang dilakukan sektor swasta. Perbedaan ini terjadi karena negara, khususnya organisasi pemerintah, tentu memiliki standar sistem akuntansi masing-masing. Jadi, proses tersebut harus disesuaikan dengan standar akuntansi yang dianut oleh lembaga.

Akuntansi Sektor Publik ini membahas karakteristik organisasi sektor publik dan mekanisme akuntansi yang ada di dalamnya, baik akuntansi manajemen, akuntansi keuangan, sistem tentang

akuntansi, penilaian kinerja, maupun pengauditan di organisasi sektor publik. Selain secara teoretis digambarkan tentang mekanisme akuntansi di organisasi sektor publik, diberikan juga gambaran praktek akuntansi yang saat ini dilaksanakan di organisasi sektor publik, khususnya di pemerintahan daerah seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Prasyarat

Untuk memprogramkan mata kuliah Akuntansi Sektor Publik ini, mahasiswa harus lulus mata kuliah Pengantar Akuntansi 2. Diasumsikan bahwa mahasiswa yang telah lulus Pengantar Akuntansi 2 berarti telah memahami dengan baik teknik penjumlahan. Bisa menyusun laporan keuangan mulai dari analisis transaksi, jurnal, posting ke buku besar, jurnal penyesuaian, menyusun laporan keuangan dan melakukan jurnal balik.

Petunjuk Penggunaan Modal

Modul ini terdiri dari satu kegiatan belajar yang akan menguraikan tentang gambaran umum akuntansi sektor publik, regulasi dan perkembangan sektor publik, kerangka konseptual akuntansi sektor publik, anggaran sektor publik anggaran pemerintah, teknik akuntansi sektor publik, laporan keuangan sektor publik, pengukuran kinerja sektor publik, akuntansi desa, akuntansi pemerintahan pusat, akuntansi keuangan daerah dan akuntansi organisasi nirlaba. Oleh karena itu, mahasiswa harus mengikuti saran berikut ini untuk bisa memahami materi dengan baik.

Langkah-langkah yang harus dilakukan mahasiswa adalah:

- a. Pahami dengan baik capaian pembelajaran mata kuliah Akuntansi Sektor Publik sekaligus memperhatikan capaian khusus yang diharapkan.
- b. Siapkan pertemuan kelas, terdapat kemampuan khusus yang diharapkan dapat dicapai. Oleh karena itu, mahasiswa harus memperhatikan kemampuan khusus ini.

- c. Setiap pertemuan kelas terdapat indikator target untuk menilai capaian pertemuan. Silahkan mengukur diri Anda. Apakah telah targetnya terpenuhi sesuai indikator yang tersedia.

Penjelasan Bagi Mahasiswa

Untuk memperoleh hasil belajar secara maksimal dalam menggunakan modul ini maka langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

- a. Baca dan Pahamiilah secara saksama uraian-uraian materi yang ada pada kegiatan belajar ini.
- b. Kerjakan semua tugas formatif (soal latihan) untuk mengetahui seberapa besar pemahaman terhadap materi perkuliahan.
- c. Jika belum memahami materi yang disampaikan bertanyalah pada ada dosen

Peran Dosen

- a. Membantu mahasiswa dalam proses belajar
- b. Membimbing mahasiswa dalam memahami konsep analisa dan menjawab pertanyaan mahasiswa mengenai materi kuliah.
- c. Memberikan tugas kepada mahasiswa yang relevan sesuai dengan topik bahasan.

Tujuan Akhir

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan karakteristik dan ruang lingkup akuntansi sektor publik, anggaran Pemerintah (APBN, APBD-APB-Des), pengukuran Kinerja Sektor Publik, menyebutkan dan menjelaskan proses akuntansi, teknik akuntansi, struktur laporan keuangan, dan penggunaan informasi akuntansi pada organisasi sektor publik, serta praktik akuntansi pada Akuntansi Desa, Pemerintah Pusat, Keuangan Daerah dan Organisasi Nirlaba.

Kompetensi

Kompetensi yang diharapkan setelah menempuh mata kuliah akuntansi sektor publik yaitu memahami dengan baik gambaran umum tentang akuntansi sektor publik, laporan keuangan sektor publik khususnya laporan keuangan pemerintah dan laporan keuangan organisasi nirlaba.

Cek Kemampuan

Untuk mengecek kemampuan mahasiswa setelah menempuh mata kuliah akuntansi Sektor Publik, maka dapat diajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan indikator-indikator pada setiap pertemuan kelas yang ada di RPS.

BAB 2

PEMBELAJARAN

A. Rencana Belajar Mahasiswa

Rencana pembelajaran Akuntanasi Sektor Publik dilakukan selama satu semester dengan 16 (enam belas) kali pertemuan kelas. Pertemuan ke 8 (delapan) dilakukan UTS (Ujian Tengah Semester). Pertemuan ke 16 (enam belas) dilakukan UAS (Ujiaan Akhir Semester). Sesuai dengan aturan akademik, mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir, jika menghadiri perkuliahan 80% (delapan puluh persen) yang setara dengan 12 (dua belas kali) pertemuan kelas. Jika pertemuan kelas kurang, mahasiswa dinyatakan TBU (Tidak Bisa Ujian). Oleh karena itu, agar mahasiswa memperhatikan kehadiran kuliah di kelas agar dapat mengikuti ujian akhir. Berikut ini diuraikan kegiatan belajar selama satu semester.

B. Kegiatan Belajar

Kegiatan belajar atau yang umum dikenal dengan istilah kegiatan Belajar Mengajar (KBM) merupakan proses interaksi timbal balik antara guru/dosen dan siswa/mahasiswa yang bersifat mempengaruhi. Guru/Dosen memberikan materi ajar, dalam hal ini mempengaruhi siswa/mahasiswa agar berubah pengetahuan dari tidak tahu menjadi tahu, dari perilaku jelek menjadi berperilaku baik, dari tidak mampu melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu. Kegiatan belajar ini dirancang sebanyak 16 kali pertemuan sebagai berikut:

Kegiatan Belajar 1

GAMBARAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Mahasiswa memahami gambaran Umum Akuntansi Sektor Publik.

b. Uraian Materi

1. Apa itu Akuntansi Sektor Publik?

Akuntansi sektor publik adalah suatu proses mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasi, analisis, meringkas, serta membuat laporan transaksi keuangan untuk organisasi publik. Sektor publik sendiri memiliki makna sebagai seluruh organisasi yang tidak dijalankan secara pribadi. Namun didirikan, dibiayai yang dioperasikan oleh pemerintah atas nama publik. Berepa ahli berbeda dalam mendefinisikan Akuntansi Sektor Publik. Di antara pengertian Akuntansi Sektor Publik yaitu: akuntansi sektor publik sebagai proses pengukuran identifikasi pencatatan serta pelaporan seluruh transaksi keuangan dari pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengambil keputusan ekonomi. Sedangkan lainnya menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah akuntansi yang berguna untuk mencatat kegiatan ekonomi suatu organisasi nirlaba atau nonprofit.

Indra Bastian (2014) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga tinggi negara beserta departemen di bawahnya untuk penerapan pengelolaan berbagai dana masyarakat. Sedangkan Mardiasmo (2021) menyatakan akuntansi sektor publik adalah informasi baik dari pemerintah sebagai manajemen atau alat informasi bagi publik. Abdul Halim (2014) menyatakan bahwa akuntansi sektor publik merupakan kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan berdasarkan entitas pemerintah yang berguna sebagai pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Manajemen control, memberikan informasi yang dibutuhkan dalam mengelola organisasi secara tepat, efisien, cepat dan ekonomis dalam hal operasi ataupun penggunaan sumber daya yang dipercayakan atau dianggarkan untuk suatu instansi atau organisasi.

Akuntabilitas. Akuntabilitas pada akuntansi sektor publik hampir sama dengan manajemen control. Manajemen kontrol menyediakan informasi bagi manajer dari organisasi sektor publik dalam melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan sumber daya atau divisi yang berada di bawah kewenangannya. Tujuan lainnya adalah untuk melaporkan kegiatan pada publik atas operasi organisasi pemerintah dan anggaran publik.

3. Apa itu Organisasi Publik?

Organisasi sektor publik adalah organisasi yang berhubungan dengan kepentingan publik dan penyediaan barang atau jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara Yang diatur dengan hukum.

3.1. Ciri-ciri organisasi sektor publik

- Tidak mencari keuntungan finansial
- Dimiliki secara kolektif oleh publik
- Kepemilikan sumber daya bukan berbentuk saham
- Keputusan terkait kebijakan atau operasi berdasarkan konsensus

3.2. Ada 4 tipe organisasi sektor publik

a. **Pure-Profit Organization**, Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya sehingga bisa dinikmati oleh para pemilik. Sumber pendanaan organisasi ini

berasal dari investor swasta dan kreditor. contohnya pasar swalayan salon kecantikan dan distro.

- b. **Quasi-Profit Organization.** Tujuan organisasi ini adalah menyediakan atau menjual barang dan atau jasa dengan maksud utama untuk memperoleh laba dan mencapai sasaran atau tujuan lainnya sebagaimana yang dikehendaki Para pemilik.
- c. **Quasi-Nonprofit organization.** Menyediakan atau menjual barang dan jasa dengan maksud sama untuk melayani masyarakat memperoleh keuntungan (surplus). Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari investor pemerintah, investor swasta dan kreditor. Contohnya rumah sakit dan institusi pendidikan.
- d. **Pure-nonprofit organization.** Menyediakan atau kau menjual barang dan jasa dengan maksud utama untuk melayani yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber pendanaan organisasi ini berasal dari pajak, retribusi, utang, obligasi, laba BUMN/BUMD, hibah dan sumbangan. Contohnya panti asuhan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi pemerintahan.

4. Perbedaan dan Persamaan Organisasi Sektor Publik dan Swasta

Bagian dari sistem ekonomi negara, bagian internal sistem ekonomi negara dan menggunakan sumber daya yang sama guna mencapai tujuan organisasi. Kelangkaan sumber daya. Keduanya dituntut untuk menggunakan sumber daya secara ekonomis efektif dan efisien.

Proses pengendalian manajemen, membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Dalam melaksanakan fungsi manajemen yaitu perencanaan pengorganisasian dan pengendalian. Produk menghasilkan produk yang memiliki jenis yang sama atau bergerak pada bidang yang sama.

5. Ruang Lingkup Akuntansi Sektor Publik dan Perkembangannya

Abad ke-1 sampai dengan abad ke-5 disebut periode Roma. Praktek akuntansi untuk mendukung mekanisme pajak dilakukan. Semua pejabat yaitu Gubernur ataupun Kaisar melakukan pungutan pajak.

Pertengahan abad ke-14 atau periode Eropa. Di Genoa praktek pencatatan transaksi keuangan berwujud bukti transaksi keuangan antar pemerintah yang berkuasa dan rakyat. Kemudian, berkembang dalam proses perdagangan antar negara. di saat ini belahan dunia lain gereja memasuki pemerintahan.

Awal abad ke-15 periode Eropa. Kekuatan perekonomian bergeser dari Italia ke Inggris. Proses pelaporan dikembangkan lebih rinci terutama pada informasi tenaga kerja, metode produksi, tipe dan kualitas barang yang diproduksi, harga penjualan, dan metode pemasaran.

Akhir abad ke-18 periode Eropa. Terjadi perubahan mendasar dalam aturan bisnis. inisiatif individu lebih dihargai dan berpeluang luas. mengakibatkan revolusi industri di Inggris yang menunjukkan pengembangan akuntansi keuangan dan biaya di perusahaan lebih dipicu perkembangan praktik akuntansi sektor publik.

Abad ke-19 sampai abad ke-20 periode Eropa. Profesi akuntan sektor publik berkembang lebih lambat. interpretasi yang salah mulai muncul dengan menyamakan akuntansi sektor publik sebagai proses pencatatan penarikan Pajak yang dipungut oleh pemerintah.

Periode 1950 sampai 1960-an. Sektor publik memiliki peran utama dalam strategi pembangunan. Pada 1970an, ada kritikan dan serangan dari pendukung teori pembangunan radikal. Selanjutnya tahun 1980-an, reformasi sektor publik dilakukan di negara industry. Hal ini ditandai dengan diadopsinya *New Public Management* (NPM) dan *reinventing government*.

6. Perkembangan Akuntansi Sektor Publik di Indonesia

Akuntansi sektor publik di Indonesia memiliki perkembangan yang baik, ditandai dengan adanya peraturan yang mengatur penerapan

akuntansi sektor publik khususnya pemerintahan dan adanya standar akuntansi pemerintah (SAP). Perkembangan meliputi bidang konsentrasi: akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, pemeriksaan akuntansi (auditing).

7. Barang dan Jasa Publik

Barang dan jasa publik adalah barang/jasa yang dapat dikonsumsi/digunakan semua orang tanpa terkecuali. Barang dan jasa publik memiliki dua sifat utama yaitu tidak dibatasi (*non excludable*) dan dapat dinikmati oleh banyak orang pada saat yang bersamaan (*non rival*). Selain kedua sifat tersebut masih ada sifat lainnya yang melekat yaitu tidak dapat ditolak (*non rejectable*) dan tidak dapat dibagi-bagi (*non indivisible*).

8. Apa Profesi Akuntansi Sektor Publik?

Program studi akuntansi sektor publik sejatinya akan diarahkan untuk berkarir dalam lingkup sektor publik juga seperti pada kantor pemerintahan sebagai PNS atau non PNS. Walaupun pada dasarnya dalam lingkup sektor publik tidak menutup kemungkinan bagi lulusan untuk menyebrang ke sektor swasta memiliki kompetensi di bidang akuntansi yang juga dibutuhkan di sektor swasta.

Pemeriksaan keuangan, profesi di bidang pemeriksaan keuangan ini memiliki tugas dari jabatan yang sangat banyak diantaranya adalah memahami sistem akuntansi meninjau ulang laporan keuangan yang relevan dalam melakukan audit. Pegawai pajak atau pegawai persiapan pajak. Pegawai pajak akan ditempatkan sebagai pegawai pemerintah. Tugasnya yaitu menyiapkan pengembalian pajak untuk individu maupun usaha kecil.

Auditor akuntan publik. Auditor independen yang memiliki tugas sebagai pengaudit laporan keuangan yang bertujuan menyatakan opini suatu laporan keuangan.

c. Rangkuman

Organisasi sektor publik adalah sebuah entitas ekonomi yang menyediakan barang dan/atau jasa publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk mencari keuntungan finansial. Organisasi sektor publik memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Dijalankan tidak untuk mencari keuntungan finansial.
2. Dimiliki secara kolektif oleh publik.
3. Kepemilikan atas sumber daya tidak digambarkan dalam bentuk saham yang dapat diperjualbelikan.
4. Keputusan-keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi didasarkan pada konsensus.

Sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, politik, kultur, dan demografi.

Perbedaan karakteristik sektor publik dengan sektor swasta dapat dilihat dengan membandingkan tujuan organisasi, sumber pembiayaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, karakteristik anggaran dan stakeholder, sistem akuntansi yang digunakan. Sektor publik dan sektor swasta mengalami masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya (*scarcity of resources*), sehingga baik sektor publik maupun sektor swasta dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Akuntansi sektor publik merupakan alat informasi bagi pemerintah sebagai manajemen maupun alat informasi bagi publik. Akuntansi sektor publik akan terus berkembang seiring dengan meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

d. Tugas

Amati di daerah domisi mu, sebutkan organisasi sektor publik yang beroperasi di wilayah tempat tinggal mu! Aktivisnya apa saja? Apakah dampak positif terhadapnya masyarakat? Jelaskan.

e. Tes Formatif

Jawab Pertanyaan berikut ini:

1. Sebutkan pengertian akuntansi sektor publik?
2. Apa tujuan akuntansi sektor publik?
3. Sebutkan ciri organisasi sektor publik!
4. Apa perbedaan organisasi sektor publik dan private?
5. Sebutkan ruang lingkup ASP!
6. Apa yang dimaksud barang dan jasa publik!
7. Sebutkan profesi akuntansi sektor publik!

f. Kunci Jawaban

1. Akuntansi untuk sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan pengelolaan keuangan dalam lembaga publik. Laporan pengelolaan keuangan ini nantinya digunakan lembaga publik untuk memberikan informasi keuangan pada pihak yang membutuhkan. Intinya, laporan pengelolaan keuangan ini sangat membantu saat ada pengambilan keputusan.
2. Tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan. Selanjutnya laporan ini akan digunakan untuk pengendalian manajemen sebagai pertanggungjawaban.
3. Organisasi sektor publik memiliki ciri sebagai berikut: a) Tidak mencari keuntungan finansial b). Dimiliki secara kolektif oleh publik c). Kepemilikan sumber daya tidak dalam bentuk saham d) Keputusan yang terkait kebijakan maupun operasi berdasarkan konsensus.

4. Sasaran organisasi publik ditujukan pada hal-hal yang 'terpisah' dari masyarakat secara umum. Sedangkan organisasi private atau bisnis adalah organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen, yang dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai hukum pasar.
5. Ruang lingkup akuntansi sektor publik:
 - Lembaga tinggi pemerintahan negara dan departemen di bawah naungannya.
 - Lembaga pemerintah daerah.
 - Yayasan
 - Partai Politik dan LSM
 - Organisasi Non profit
 - Kesehatan
 - Sekolah
 - Perguruan tinggi,
6. Barang publik (*public goods*) adalah barang yang ketika anda gunakan tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain. Pemerintah biasanya menyediakan barang-barang publik
7. Profesi yang digeluti oleh lulusan akuntansi sektor publik pastinya adalah sebagai staf akuntan sektor publik, Auditor Sektor Publik, Manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah, dan staf pajak departemen akuntansi sektor publik.

Kegiatan Belajar 2

REGULASI DAN PERKEMBANGANNYA DALAM RUANG SEKTOR PUBLIK

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Memahami dan menjelaskan beberapa regulasi dan perkembangannya dalam ruang lingkup Sektor Publik

b. Uraian Materi

1. Definisi Regulasi Publik

Regulasi berasal dari bahasa asing yaitu *regulation* atau peraturan. Regulasi Publik adalah segala peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan dalam organisasi publik seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan dll.

2. Teknik Penyusunan Regulasi Publik

- a. Pendahuluan (Disusun karena ada isu atau masalah)
- b. Mengapa diatur? (Mencari jawaban terhadap isu)
- c. Permasalahan (Regulasi digunakan apabila isu tersebut tidak dapat di alternatif)
- d. Dengan apa diatur? (Hal ini harus dirumuskan sehingga segera disikapi)
- e. Diskusi dan Musyawarah (Memerlukan forum diskusi untuk mengupas tuntas)
- f. Catatan (Hasil Proses Diskusi)

3. Kebutuhan Regulasi dan Standar di Sektor Publik

a. Kebutuhan Regulasi

Aktivitas organisasi sektor publik ini memenuhi hajat orang banyak, yang dimana kita tidak mungkin terlepas dengan masalah-masalah yang dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu kita membutuhkan regulasi sebagai aturan meminimkan kesalahan yang

ada. Contoh Regulasi : Pemerintahan tidak terlepas dengan kesalahan dalam bidang keuangan baik itu rugi atau untungya dia .Masyarakat hanya bisa angkat tangan mengenai hal itu. Namun disinilah fungsi regulasi yaitu meminimkan kesalahan yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Standar Sektor Publik

Dalam konteks organisasi sektor publik, sebuah paket standar akuntansi tersendiri diperlukan karena kekhususan yang signifikan antara organisasi sektor publik dengan perusahaan komersial, diantaranya adanya kewajiban pertanggungjawaban yang lebih besar kepada publik atas penggunaan dana-dana yang dimiliki.

4. Perkembangan Regulasi di Sektor Publik

a. Regulasi Nirlaba

1) Regulasi tentang Yayasan

- Undang-Undang No.16/2001
- Undang-Undang No.28/2004

2) Regulasi tentang Partai Politik

- Undang-Undang No.2/1999
- Undang-Undang No.31/2002
- Undang-Undang No.2/2008

3) Regulasi tentang Badan Hukum Milik Negara dan Badan Hukum Pendidikan Universitas yang pertama kali ditetapkan berstatus BHMN oleh pemerintah adalah

- a. Universitas Indonesia (UI): PP No 152/2000
- b. Universitas Gajah Mada (UGM): PP No 153/2000
- c. Institut Pertanian Bogor (IPB): PP No 154/2000
- d. Institut Teknologi Bandung (ITB): PP No 155/2000
- e. Universitas Sumatera Utara (USU): PP No 56/2003
- f. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung: PP No 6/2004
- g. Universitas Airlangga (Unair) Surabaya: PP No 30/2006

4.1. Ciri-Ciri BHMN

- Memiliki Majelis Wali Amanat(MWA)
- Memiliki Senat Akademik (SA)
- Memiliki Otonomi manajemen dana dan akademik

Pada tahun 2008 disahkan undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan. Prinsip BHP :

- a. Nirlaba
- b. Otonom
- c. Akuntabel
- d. Transparan
- e. Penjamin mutu
- f. Layanan prima
- g. Akses yang berkeadilan
- h. Keberagaman
- i. Keberlanjutan
- j. Partisipasi atas tanggung jawab negara

4.2. Regulasi tentang Badan Layanan Umum

Regulasi khusus yang menjelaskan tentang BLU adalah PP no 23/2000 tentang Pengelolaan Keuangan BLU.

Kriteria untuk Menjadi BLU:

- a. Bukan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan sebagai satuan kerja instansi pemerintah. Contohnya: Unmul.
- b. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi
- c. Berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya:
 - Kedua belah pihak menandatangani kontrak kinerja
 - Menteri/pimpinan lembaga bertanggung jawab atas kebijakan layanan yang hendak dihasilkan,
 - BLU bertanggungjawab menyajikan layanan yang diminta.

4.3. Perkembangan Regulasi Keuangan Negara

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, telah merubah beberapa hal sebagai berikut:

- Kekuasaan atas Pengelolaan keuangan Negara
- Penyusunan dan Penetapan APBN
- Penyusunan dan Penetapan APBD
- Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, serta Pemerintah/Lembaga Asing.
- Hubungan Keuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat
- Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD

2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntans publik berdasarkan ketentuan UU yang selanjutnya wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

- Ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara
- Kewenangan pejabat perbendaharaan negara
- Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara atau daerah
- Pengelolaan uang negara/daerah
- Pengelolaan piutang dan utang negara
- Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah
- Penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD

- Pengendalian intern pemerintah
- Penyelesaian kerugian negara/daerah
- Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

4) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

c. Perkembangan Regulasi Otonomi Daerah

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

4.4. Perkembangan Standar Di Sektor Publik

Pada tahun 2002, Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntansi Sektor Publik (IAI-KASP) telah mengembangkan standar-standar akuntansi yang direkomendasi untuk digunakan pada entitas-entitas sektor publik yang dinamakan Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP). Dalam standar ini, IAI – KASP telah melakukan harmonisasi terhadap akuntansi, laporan keuangan dan auditing antar yurisdiksi dan mana yang tepat, antara sektor publik dan swasta, dan untuk mengharmonisasikan laporan keuangan antara accounting basis dan economic basis.

Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP) dikembangkan sesuai dengan standar yang berlaku di tingkat internasional, dengan harapan dapat tercapainya informasi keuangan yang konsisten dan dapat dibandingkan untuk semua yurisdiksi.

5. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

1. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara

Standar pemeriksaan merupakan patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara yang meliputi:

- 1) Standar umum
- 2) Standar pelaksanaan
- 3) Standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa

2. Pemeriksaan Keuangan Negara

Pemeriksaan keuangan negara adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dengan demikian, pemeriksaan keuangan negara memberikan keyakinan yang memadai.

Proses pemeriksaan meliputi:

- 1) Perencanaan,
- 2) Pelaksanaan,
- 3) Pelaporan, dan
- 4) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan

a. Jenis Pemeriksaan Keuangan Negara

- 1) Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan
- 2) Pemeriksaan kinerja tujuan pemeriksaan kinerja adalah memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.

b. Unsur-Unsur Pemeriksaan Keuangan Negara

- 1) Hubungan tiga pihak, yang terdiri atas:
 - Keuangan negara

- Pihak yang bertanggung jawab, dan
 - Pengguna LHP
- 2) Hal pokok (*subject matter*) dan informasi hal pokok (*subject matter information*)
 - 3) Kriteria pemeriksaan
 - 4) Bukti pemeriksaan;
 - 5) Laporan hasil pemeriksaan; dan
 - 6) Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan
- c. Pihak Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara
- 1) Pemeriksa keuangan negara. BPK adalah lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
 - 2) Pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang diperiksa, yang bertanggung jawab atas informasi hal pokok dan/atau bertanggung jawab mengelola hal pokok, dan/atau bertanggung jawab menindaklanjuti hasil pemeriksaan antara lain Presiden, Menteri, dan Kepala Daerah.
 - 3) Pengguna LHP
 - 4) Lembaga perwakilan
 - 5) Pemerintah
 - 6) Pihak lain yang berkepentingan
- d. Kriteria Pemeriksaan
- a. Relevan
 - b. Lengkap
 - c. Andal
 - d. Netral
 - e. Dapat dipahami

3. Penyusunan Regulasi Publik

a. Perumusan Masalah

Perumusan masalah public diawali dengan merumuskan masalah yang akan diatur. perumusan masalah public meliputi :

- Apa masalah publik yang ada?
- Siapa masyarakat yang perilakunya bermasalah?
- Siapa aparat pelaksana yang perilakunya bermasalah?
- Analisis keuntungan dan kerugian atas penerapan regulasi publik?
- Tindakan apa yang diperlukan untuk mengatasi masalah publik?

b. Perumusan Draft Regulasi Publik

c. Prosedur Pembahasan

d. Pengesahan dan Pengundangan

c. Rangkuman

Regulasi sektor publik adalah ketentuan atau peraturan yang harus dipatuhi dan dijalankan dalam proses pengelolaan organisasi sektor publik, baik organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partai politik maupun organisasi lainnya.

Sektor publik tidak bisa lepas dari regulasi, karena untuk mengetahui aktivitas sektor publik mengharuskan adanya regulasi untuk menghindari penyalahgunaan laporan keuangan yang dapat menyebabkan kerugian pada masyarakat. Untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap publik, dibutuhkan standar akuntansi yang menjadi acuan bagi para akuntan untuk membuat laporan keuangan. Setelah mengetahui fungsi dari regulasi, kita pasti mempertanyakan mengenai peraturan-peraturan dalam pengelolaan organisasi sektor publik. Namun, sebelum membuat peraturan-peraturan diperlukan adanya dasar hukum yang terkait dengan penyusunan regulasi sektor publik.

Regulasi sektor publik akan selalu berkembang karena mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dan keadaan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan dan atau regulasi ini akan berdampak pada praktik akuntansi sektor publik. Seorang praktisi akuntansi sektor publik harus selalu senantiasa mengikuti perkembangan ini seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

d. Tugas

Silahkan cari di google, regulasi apa saja yang dikeluarkan pemerintah beberapa tahun terakhir ini berkaitan dengan organisasi sektor publik. Apa nama regulasinya? Apa latar belakang regulasi tersebut? Apa tujuan regulasi tersebut?

e. Tes Formatif

Jawab pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang dimaksud dengan regulasi sektor publik?
2. Mengapa harus ada regulasi sektor publik?
3. Siapa yang merancang regulasi akuntansi sektor publik?
4. Mengapa sektor publik harus diatur dengan regulasi?
5. Apa yang dimaksud dengan standar pemeriksaan keuangan negara?

f. Kunci Jawaban

1. Regulasi dalam sektor publik adalah suatu instrumen aturan yang secara sah diterapkan oleh organisasi publik, ketika melakukan perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan, audit serta pertanggungjawaban.
2. Alasan penyusun regulasi publik sebuah regulasi publik disusun karena adanya berbagai isu terkait, yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi publik. Permasalahan dan misi sebuah regulasi publik disusun dan ditetapkan jika solusi alternatif atau suatu permasalahan telah dapat dirumuskan.

3. Organisasi yang merancang standar ini adalah *Internasional Federation of Accountants – IFAC* (Federasi Akuntan Internasional). Mereka membuat suatu standar akuntansi sektor publik yang disebut *International Public Sector Accounting Standards - IPSAS* (Standar Internasional Akuntansi Sektor Publik).
4. Regulasi publik digunakan sebagai alat untuk memperlancar jalannya siklus sektor publik agar tujuan organisasi dapat tercapai. Siklus produk regulasi dari akuntansi sektor publik sebagai sebuah siklus tahapan dalam akuntansi sektor publik saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.
5. Standar pemeriksaan keuangan negara yang selanjutnya disingkat SPKN adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan.

Kegiatan Belajar 3

RERANGKA KONSEPTUAL AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Memahami dan menjelaskan rerangka konseptual akuntansi sektor publik (ASP)

b. Uraian Materi

1. Definisi Rerangka Konseptual ASP

Rerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik. Konsep ini meliputi perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, serta pertanggungjawaban organisasi sector public seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, partai politik, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga peribadatan.

Rerangka konseptual ini merupakan acuan dalam pengembangan standar akuntansi dan solusi atas berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut. Jika terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan standar akuntansi, ketentuan standar akuntansi itu diuji menurut unsur kerangka konseptual yang terkait. Dalam jangka panjang, konflik semacam itu diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan standar akuntansi di masa depan.

2. Tujuan dan Peranan Rerangka Konseptual ASP

Rerangka konseptual akuntansi sektor publik disusun dengan berbagai tujuan, yaitu acuan bagi :

- a. Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugasnya, termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintahan.
- b. Penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik.
- c. Auditor, seperti BPK dan KAP, untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.
- d. Para pemakai laporan keuangan sector public untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku disektor publik.

3. Lingkup Rerangka Konseptual ASP

Sebagai sebuah siklus, akuntansi sektor publik terangkai dari proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan, audit serta pertanggungjawaban. Dengan demikian, pembahasan tentang kerangka konseptual akuntansi sektor publik ini akan meliputi:

- a. Perencanaan publik
- b. Penganggaran publik
- c. Realisasi anggaran publik
- d. Pengadaan barang dan jasa publik
- e. Pelaporan sektor publik
- f. Audit sektor publik

- g. Pertanggungjawaban publik

4. Elemen Laporan Keuangan Sektor Publik

Posisi Keuangan, unsur yang terkait langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sbb :

- a. Aktiva
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas
- d. Kinerja
- e. Pendapatan
- f. Biaya
- g. Penyesuaian pemeliharaan modal

5. Pengakuan dan Pengukuran Transaksi Publik

Pengakuan (*recognition*) dilakukan dengan menyatakan pos tersebut, baik dalam kata-kata maupun jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam laporan posisi keuangan atau laporan kinerja keuangan. Pos yang memenuhi definisi suatu unsur harus diakui jika :

- a. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam organisasi publik.
- b. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan sector public ke dalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan untuk derajat kombinasi yang juga berbeda dalam laporan keuangan sektor publik

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan sector public ke dalam laporan posisi keuangan dan laporan kinerja keuangan. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan untuk derajat kombinasi yang juga berbeda dalam laporan keuangan sektor publik.

Suatu pos dapat dianggap memenuhi persyaratan pengakuan di masa depan sebagai akibat dari peristiwa atau keadaan yang terjadi kemudian. Sejumlah dasar pengukuran yang berbeda digunakan untuk derajat kombinasi yang juga berbeda dalam laporan keuangan sektor publik. Berbagai dasar pengakuan tersebut adalah :

- a. Biaya Historis (*historical cost*)
- b. Biaya Saat ini (*current cost*)
- c. Nilai realisasi/penyelesaian (*realizable/settlement value*)
- d. Nilai sekarang (*present value*)

6. Akuntansi Berbasis Kas vs Berbasis AkruaI dan Modifikasinya

a. Berbasis Kas

Sistem akuntansi ini hanya mengakui arus kas masuk dan kas keluar. Laporan arus kas banyak dipakai dalam akuntansi bisnis, namun hanya sebagai tambahan laporan pendapatan dan laporan posisi keuangan. Focus pemecahan permasalahan adalah mendefinisikan jumlah pendapatan yang dapat dipakai tanpa mengurangi modal.

b. Berbasis AkruaI

Definisi konsep akuntansi akruaI sebagaimana tercantum pada SSAP adalah “penerimaan dan biaya bertambah sesuai satu sama lain dapat dipertahankan atau dianggap benar, dan berkaitan dengan rekening laba dan rugi selama periode bersangkutan”

c. Rangkuman

Rerangka konseptual merupakan acuan dan juga dalam pengembangan dalam standar akuntansi dan solusi atas berbagai hal yang belum diatur dalam standar tersebut. Rerangka konseptual yang dibahas akan terkait dengan proses perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi anggaran, pelaporan, audit serta pertanggungjawaban.

Rerangka konseptual akuntansi sektor publik disusun dengan berbagai tujuan, yaitu acuan bagi :

1. Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugasnya, termasuk tim penyusun standar akuntansi pemerintahan.
2. Penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara umum dan standar akuntansi keuangan sektor publik.
3. Auditor, seperti BPK dan KAP, untuk memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum.
4. Para pemakai laporan keuangan sektor publik untuk menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku di sektor publik.

Rerangka konseptual ini bukan merupakan standar akuntansi keuangan sector publik. Ketika terjadi pertentangan antara rerangka konseptual dan standar akuntansi keuangan sektor publik, ketentuan standar akuntansi keuangan sektor publik akan diuji menurut unsur rerangka konseptual yang relevan. Meskipun demikian, penggunaan rerangka konseptual ini sebagai acuan bagi komite penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam pengembangan standar akuntansi keuangan sektor publik dimasa depan, dan dalam peninjauan kembali

terhadap standar akuntansi keuangan sektor publik yang berlaku, akan mengurangi konflik tersebut.

Revisi rerangka konseptual bisa dilakukan dari waktu ke waktu, selaras dengan pengalaman komite penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam penggunaan rerangka konseptual tersebut.

d. Tugas

Silahkan mereview artikel tentang rerangka konseptual akuntansi sektor publik. Review dilakukan dengan menggunakan pola yang umum dilakukan yaitu jelaskan tentang: latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, objek penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, simpulan penelitian, kelebihan dan kekurangan penelitian.

e. Tes Formatif

1. Apa yang dimaksud dengan rerangka konseptual akuntansi?
2. Apa tujuan memiliki rerangka konseptual?
3. Apa yang dirumuskan dalam rerangka konseptual akuntansi sektor publik dan sebutkan tujuan dari kerangka konseptual akuntansi sektor publik?
4. Apa tujuan dan peranan rerangka konseptual akuntansi sektor publik?
5. Apa hubungan rerangka konseptual dengan standar akuntansi pemerintah?
6. Mengapa dalam akuntansi ada rerangka konseptual akuntansi?

5. Kunci Jawaban

1. Rerangka konseptual adalah struktur teori akuntansi yang didasarkan pada penalaran logis yang menjelaskan kenyataan yang terjadi dan menjelaskan apa yang harus dilakukan apabila ada fakta atau fenomena yang baru.
2. Tujuan rerangka konseptual merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP) yang selanjutnya dapat disebut standar. Tujuannya adalah sebagai acuan bagi para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar.

3. Rerangka konseptual akuntansi disusun dengan berbagai tujuan, yaitu
 - a). Tim penyusun standar akuntansi keuangan sektor publik dalam tugasnya.
 - b). Penyusun laporan keuangan untuk memahami praktek akuntansi menurut prinsip akuntansi yang secara lazim dan standar akuntansi keuangan sektor publik.
4. Rerangka konseptual akuntansi sektor publik merupakan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan dalam sektor publik untuk kepentingan eksternal. Rerangka konseptual akuntansi sektor publik merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan pelaksanaan siklus akuntansi sektor publik.
5. Rerangka konseptual berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam standar akuntansi pemerintahan. Dalam hal terjadi pertentangan antara rerangka konseptual dan standar maka ketentuan standar diunggulkan relatif terhadap rerangka konseptual.
6. Rerangka kerja konseptual diperlukan untuk menjadi pedoman penyusunan standar akuntansi oleh badan pembuat standar. Hal ini diperlukan sebagai acuan solusi masalah praktik yang baru muncul yang belum ada standarnya dan masalah tersebut akan cepat terselesaikan karena sudah ada rerangka dasar teorinya.

Kegiatan Belajar 4

AKUNTANSI MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Dengan mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan dapat memahami tentang akuntansi manajemen sektor publik, peran perencanaan dan peran pengendalian. Serta dapat mengerti peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik.

b. Uraian Materi

1. Definisi Akuntansi Manajemen Sektor Publik

Menurut *Institute of Management Accountants* tahun 1981 memiliki definisi akuntansi manajemen sebagai suatu proses untuk pengidentifikasian, pengukuran, penganalisaan, pengakumulasian, penyajian, pengkomunikasian informasi keuangan/finansial, serta pengintegrasian keuangan yang tentunya akan digunakan oleh bagian manajemen perencanaan, evaluasi serta pengendalian organisasi dan untuk menjamin supaya sumber daya yang digunakan secara akuntabel dan tepat.

2. Peran Perencanaan

Dalam perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Informasi akuntansi diperlukan untuk membuat prediksi – prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi yang akan datang dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini.

3. Informasi Sebagai Alat Perencanaan

- a. Informasi sifatnya rutin *ad hoc*
- b. Informasi kuantitatif dan kualitatif

- c. Informasi disampaikan melalui saluran formal atau informal

4. Peran Pengendalian

Dalam perencanaan organisasi, akuntansi manajemen berperan dalam pemberian informasi historis dan prospektif untuk memfasilitasi perencanaan. Fungsi utama informasi akuntansi pada dasarnya adalah pengendalian. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif.

5. Peran Akuntansi Manajemen dalam Sektor Publik

a. Perencanaan Stratejik (*strategic planning*)

Memberikan data/informasi akurat seputar akuntansi seperti *cost of program* serta *cost of activity*.

b. Pemberian Informasi Biaya

Memberikan rincian biaya sedetail mungkin meliputi biaya input, output, serta biaya proses.

c. Penilaian Investasi

Menggunakan analisis efektifitas biaya (*cost-effectiveness analysis*).

d. Penganggaran

Akuntansi manajemen sektor publik diharapkan mampu berperan dalam memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang lebih efektif

e. Penentuan biaya pelayanan (*cost of servies*) dan penentuan tarif pelayanan (*charging for service*)

Digunakan untuk menghitung berapa banyak pengeluaran / cost yang digunakan untuk membuat layanan / jasa publik

f. Penilaian Kinerja

Akuntansi manajemen digunakan untuk melakukan penilaian kinerja untuk mengukur seberapa besar tingkat efektivitas serta efisiensi organisasi guna mencapai tujuan yang sudah dicanangkan.

6. Perencanaan Strategi

Merupakan Proses penentuan program-program aktivitas atau proyek yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi dan penentuan jumlah alokasi sumber daya yang akan dibutuhkan.

Tujuan utama perencanaan strategi adalah untuk meningkatkan komunikasi antara manajer puncak dengan manajer bawahnya.

7. Pengendalian Manajemen Sektor Publik

Pengendalian manajemen perlu untuk menjamin terlaksananya strategi organisasi secara efektif dan efisien. Pengendalian manajemen meliputi aktivitas: Perencanaan, Koordinasi, Komunikasi informasi, Pengambilan Keputusan, Motivasi, Pengendalian dan Penilaian Kinerja.

c. Rangkuman

Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer sektor publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Informasi akuntansi diberikan sebagai alat atau sarana untuk membantu manajer menjalankan fungsi-fungsi manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Fungsi manajemen seperti perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian dan pengendalian tidak dapat dilakukan tanpa informasi yang memadai. Informasi dalam sebuah organisasi merupakan perekat yang mengikat fungsi-fungsi manajemen

dalam sebuah sistem sehingga memungkinkan organisasi bertindak koheren dan harmonis antar berbagai fungsi.

Akuntansi manajemen merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang integral. *Institute of Management Accountants* (1981) mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pengakumulasian, penganalisaan, penyiapan, pengintepretasian, dan pengkomunikasian informasi finansial yang digunakan oleh manajemen perencanaan, evaluasi, dan pengendalian organisasi serta untuk menjamin bahwa sumber daya digunakan secara tepat dan akuntabel.

Institute Of Manajement Accountants maupun *Chartered Intitute Of Manajement Accountants* secara bersama-sama menyatakan bahwa akuntansi manajemen merupakan bagian yang integral dari sistem pengendalian manajemen. Oleh karena itu, akuntansi manajemen merupakan bagian yang integral maka pengembangan akuntansi manajemen tidak dapat dilakukan secara parsial dan terisolasi dari sistem yang lain. Desain pengembangan akuntansi manajemen harus dikaitkan dengan orang-orang yang akan menjalankan sistem tersebut. Apa yang dikehendaki personel dalam organisasi dan bagaimana reaksi mereka terhadap sistem pengendalian akuntansi yang akan diterapkan harus menjadi perhatian utama dalam mendesain akuntansi manajemen.

d. Tugas

Silahkan mereview artikel tentang akuntansi manajemen sektor publik. Review dilakukan dengan menggunakan pola yang umum dilakukan yaitu jelaskan tentang: latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, objek penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, simpulan penelitian, kelebihan dan kekurangan penelitian.

e. Tes Formatif

1. Apa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen sektor publik?
2. Apa saja peran akuntansi manajemen sektor publik?

3. Bagaimana sistem pengendalian manajemen sektor publik?
4. Apakah yang dimaksud dengan manajemen sektor publik?
5. Apa itu manajemen publik dan contohnya?

f. Kunci Jawaban

1. Akuntansi manajemen sektor publik sebagai suatu bagian integral dari manajemen yang terkait dengan pendefinisian, penyajian dan penginterpretasian informasi yang digunakan untuk perumusan strategi, perencanaan dan pengendalian aktivitas, pengambil keputusan, pengoptimalan penggunaan sumber daya, pengungkapan kepada stakeholders, Pengungkapan pada karyawan dan Perlindungan Aset. Akuntansi Manajemen sektor publik merupakan bagian yang integral dari sistem pengendalian manajemen. Akuntansi manajemen sektor publik cenderung memberikan laporan yang sifatnya prospektif
2. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Akuntansi manajemen sektor publik merupakan bagian dari suatu sistem pengendalian manajemen yang terintegrasi.
3. Sistem pengendalian manajemen sektor publik berfokus Bagaimana melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Pada tahap ini pengendalian manajemen terkait dengan perumusan strategi dan perencanaan strategik yang dijabarkan dalam bentuk program-program.
4. Strategi manajemen sektor publik adalah rencana yang terkait dengan serangkaian tindakan dan mencakup seluruh elemen yang kasat mata maupun yang tak kasat mata guna menjamin keberhasilan pencapaian kesejahteraan. Konsep kesejahteraan

secara umum berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.

5. Manajemen publik adalah ilmu pengelolaan, perencanaan, dan pelaksanaan seluruh fungsi yang berhubungan dengan sumber daya manusia, informasi, politik. Pengelola utama dari Manajemen Sektor Publik adalah pemerintahan beserta seluruh stafnya.

Kegiatan Belajar 5

ANGGARAN SEKTOR PUBLIK

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Mahasiswa memiliki pemahaman tentang Anggaran Sektor Publik

b. Uraian Materi

1. Teori Penganggaran Publik

Pengertian penganggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran.

Menurut *National Committee on Governmental Accounting* (NCGA), saat ini *Governmental Accounting Standards Board* (GASB), definisi anggaran *budget* yaitu, “*Rencana* operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.”

2. Sistem Penganggaran Publik

Anggaran merupakan salah satu instrumen yang berperan penting dalam organisasi sektor publik. Anggaran disusun dengan berbagai sistem-sistem yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang melandasi pendekatan tersebut. Adapun sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan adalah:

1. *Traditional Budgeting System*
2. *Performance Budgeting System*
3. *Planning Programming Budgeting System (PPBS)*

3. Traditional Budgeting System (Sistem Anggaran Tradisional)

Traditional budgeting system adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penyusunannya lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran.

4. Performance Budgeting System

Performance budgeting system berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan.

5. *Planning Programming Budgeting System (PPBS)*

Dalam PPBS ini, perhatian banyak ditekankan pada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional yaitu untuk kesejahteraan rakyat karena pemerintah bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi barang maupun jasa dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain.

Ada beberapa tahap dalam penyusunan PBBS, yaitu :

1. Menentukan tujuan yang hendak dicapai;
2. Mengkaji pengalaman-pengalaman di masa lalu;
3. Melihat prospek perkembangan yang akan datang;
4. Menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan.

Setelah keempat tahap di atas selesai disusun, barulah memasuki tahap selanjutnya yang terdiri dari:

1. Menyusun program pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan
2. Berdasarkan program pelaksanaan ditentukan berapa jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan program-program tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam PPBS adalah:

1. Untuk menerapkan sistem ini, dituntut kemampuan dalam menyusun rencana dan program secara terpadu.
2. Dibutuhkan informasi yang lengkap, baik informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang yang relevan dengan kebutuhan penyusunan rencana dan program tersebut.
3. Pengawasan mulai dilaksanakan sebelum pelaksanaan sampai selesainya pelaksanaan rencana dan program.

6. Siklus Penganggaran Publik

Dalam Siklus Penganggaran Publik terdapat beberapa tahapan, yaitu :

- Penetapan Prosedur Dan Tim Penganggaran Yang Terkait
- Penetapan Dokumen Standar Harga
- Penyebaran Dan Pengisian Formulir Rencana Kerja Dan Anggaran
- Rekapitulasi Kertas Kerja
- Pembahasan Perubahan Belanja Dan Penyesuaian Draft Anggaran Pendapatan Dan Belanja
- Penetapan Anggaran Pendapatan Dan Belanja

7. Teknik Penganggaran Publik

1. Pendekatan Fungsional

Kepentingan formal merupakan refleksi anggaran sebagai produk dari suatu entitas mandiri. Ini berarti anggaran disusun melalui proses internal organisasi. **Kepentingan Hukum** merupakan pemberi makna yang solid bagi anggaran satu entitas tertentu. Sebagai produk hukum, kepatuhan dalam melaksanakan anggaran dapat dijamin.

Alokasi anggaran dapat dikatakan efektif apabila bias menyeimbangkan berbagai strategi pencapaian tujuan (visi) yang telah ditetapkan. Distribusi anggaran selalu dikaitkan dengan agen pengeluaran *public* dan terlaksananya layanan public yang lebih baik.

Semua kebijakan ekonomi *sector public* selalu dihadapkan dengan berbagai variable yang dinamis, seperti pergerakan harga dan arah perekonomian. Ini berarti unsur unsur ketidakpastian tidak dapat dihilangkan, namun dapat diminimalkan oleh kapabilitas manajemen keuangan unit kerja dan inisiatif unit pemegang otoritas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesuksesan pelaksanaan anggaran ditentukan *pertama*, kebijakan keuangan secara menyeluruh ditentukan oleh lembaga setingkat bagian atau lembaga pelaksana tertinggi; *kedua*, kesuksesan anggaran sangat ditentukan oleh dukungan politis berbagai lembaga; *ketiga*, akurasi perencanaan terutama penganggaran, dipengaruhi oleh teknik *review* prakiraan anggaran.

2. Pendekatan Pengambilan Keputusan

Dalam prakteknya, anggaran merupakan proses pengambilan keputusan tentang kehidupan dan tujuan organisasi. Proses anggaran biasanya mempunyai standar prosedur, sementara pengambilan keputusan merupakan proses gabungan dari unsur-unsur disiplin ilmu ekonomi, politik, psikologi, dan administrasi publik.

Proses anggaran biasanya mempunyai standar prosedur, sementara pengambilan keputusan merupakan proses gabungan dari unsur-unsur disiplin ilmu ekonomi, politik, psikologi, dan administrasi public. Tarik ulur antara konsep dengan praktis, dan konteks anggaran dengan manajemen keuangan global dilakukan untuk mencapai titik optimal.

3. Pendekatan Psikologi/Motivasi

Pendekatan psikologi/motivasi merupakan salah satu teknik penganggaran publik yang sangat baik untuk dilakukan. Psikologi/motivasi bukan saja merupakan ilmu yang membahas tentang kejiwaan manusia saja, namun secara lebih luas ilmu ini juga mempelajari perekrutan dan penyeleksian pegawai, evaluasi kinerja pegawai, pelatihan pegawai, kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja, psikologi organisasi, kondisi pekerjaan, keselamatan dan kesehatan pegawai, tekanan di tempat kerja, psikologi industri, ataupun psikologi konsumen/masyarakat.

Dalam mempertimbangkan berbagai asumsi, kenyataan, dan tujuan yang ingin dicapai, penggunaan Pendekatan Psikologi/Motivasi dalam proses penganggaran akan membuat anggaran yang tersusun benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan tujuan serta sasarnya dapat dicapai secara efektif dan efisien.

4. Pendekatan Lingkungan yang Berkesinambungan

Penganggaran lingkungan yang berkesinambungan dimulai dengan proses penyusunan anggaran bagi program yang berwawasan lingkungan. Anggaran program ini harus mempertimbangkan sisi pemeliharaan dan perbaikan kondisi lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, tujuan anggaran dan program dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi lingkungan secara berkesinambungan.

8. Penganggaran Publik di Berbagai Negara Maju dan Berkembang

a. Inggris

Terdapat tiga pertalian system pembuatan keputusan

- System komite survey pengeluaran public (PSC)
- Analisis program dan review (PAR)
- Staf review kebijakan pusat (CPRS)

b. Kanada

Pendekatan PPBS Kanada sangat berbeda dengan Amerika Serikat, dimana dasar yang lebih besar diletakkan pada perencanaan pengeluaran dan penilaian afisien.

c. Prancis

- Aplikasi PPBS pada organisasi pertahanan dikenal sebagai "*planing, proraming, and preparation of the budget*" dan menawarkan kerangka kerja yang terkoordinasi dan pengendalian.
- Aplikasi pada departemen sipil yang dikenal sebagai "*optimization of public expenditure*" yang lebih menekankan pada aplikasi teknik penilaian investasi.
- Keduanya, jika dikombinasikan ke dalam, akan menjadi *rationalization of the budget chise/rationalization des choix budgetires* – RCB.
- RCB mempunyai tiga komponen: yaitu struktur program, study analitis, dan system informasi.

d. Swedia

Saat ini, system anggaran di Swedia mempunyai beberapa unsur yang mengombinasikan perencanaan, ramalan jangka menengah, dan pengukuran efisiensi.

e. Negara lainnya

- Jepang aktif memberikan pertimbangan untuk mengenalkan variasi PPBS.
- Australia, Denmark, Jerman, Selandia baru, dan belanda adalah diantara Negara yang memperkenalkan secara luas berbagai reformasi yang melibatkan pemilihan reklasifikasi anggaran kedalam program, ramalan jangka menengah, pengenalan teradap penilaian, pengukuran produktivitas, dan kinerja pada beberapa bagian.
- Yunani selama tiga tahun telah memprakarsai implementasi bentuk ZBB dan program penilaian (*productivity assessment program*). Usaha di orientasikan pada pemilihan mengadopsi beberapa bentuk ZBB, kemudian mentransplantasi system amerika serikat.

9. Implementasi Pembaharuan di Negara-Negara Berkembang

- a. Pengenalan system PPBS di India, Indonesia, Malaysia, Nepal dan Sri Lanka tidak membawa perubahan dalam mengfungsikan perencanaan dan penganggaran yang akan dilaksanakan dengan basis rangkap dua.
- b. Cakupan dari system baru juga terbatas. Dimalaysia dan Indonesia, hal itu hanya terbatas pada anggaran pembangunan, sementara di india, anggaran kinerja di siapkan sebagai dokumen pendukung.

1. Pendekatan Fungsional
2. Pendekatan Pengambilan Keputusan
3. Pendekatan Psikologi/Motivasi
4. Pendekatan Lingkungan yang Berkesinambungan

c. Rangkuman

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah suatu proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan penganggaran pada sektor swasta yang relatif kecil nuansa politisnya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dan publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang politik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun.

Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Aspek – aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi: 1). Aspek perencanaan 2). Aspek pengendalian, dan 3). Aspek akuntabilitas publik Penganggaran sektor

publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Proses penganggaran akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pengawas khusus yang bertugas mengontrol proses perencanaan dan pengendalian anggaran. Tujuan bab ini adalah memperkenalkan konsep penganggaran sektor publik dan masalah mendasar yang berhubungan dengan penentuan kebijakan, prioritas, rencana strategis, dan penentuan program.

d. Tugas

Silahkan mereview artikel tentang anggaran sektor publik. Review dilakukan dengan menggunakan pola yang umum dilakukan yaitu jelaskan tentang: latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, objek penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, simpulan penelitian, kelebihan dan kekurangan penelitian.

e. Tes Formatif

1. Apa yang dimaksud dengan anggaran sektor publik?
2. Mengapa anggaran sektor publik diperlukan?
3. Bagaimana prinsip penganggaran pada sektor publik?
4. Apa tujuan penganggaran sektor publik?
5. Apa itu Anggaran dalam sektor publik?
6. Apa saja prinsip-prinsip anggaran sektor publik?

f. Kunci Jawaban

1. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, Berapa biaya yang dibutuhkan, dan Berapa hasil yang akan diperoleh dan belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Karena untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, serta kualitas hidup masyarakat. anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat.
3. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik adalah:
 - a. Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
 - b. Komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
4. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
5. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa tahun. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
6. Prinsip-prinsip anggaran sektor publik adalah
 - a. Otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapat otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
 - b. Komprehensif anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
 - c. Keutuhan anggaran artinya harus lengkap yang menunjukkan semua rencana aktivitas yang akan dilakukan selama satu periode anggaran.

Kegiatan Belajar 6

RENCANA PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN PEMERINTAH

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Mahasiswa memiliki pemahaman tentang anggaran pemerintahan baik APBN maupun APBD.

b. Uraian Materi

1. Rencana Pembangunan Pemerintah

Pemerintah Indonesia memberikan prioritas tinggi kepada perkembangan ekonomi dan sosial di seluruh negara Indonesia. Pemerintah telah menetapkan sejumlah target yang direncanakan tercapai pada tahun 2025. Target-target ini mencakup :

- Masyarakat yang tertib, maju, damai dan berkeadilan sosial
- Populasi yang kompetitif dan inovatif
- Demokrasi yang adil
- Perkembangan sosial dan kesetaraan antara semua orang dan daerah.
- Menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik yang berpengaruh di skala global.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia menyusun 3 rencana pembangunan yang saling terkait dan bergantung, yaitu :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

RPJPN ini digunakan sebagai titik tolak untuk seluruh Indonesia (termasuk pemerintah, masyarakat dan bisnis) untuk mencapai tujuan nasional seperti yang telah direncanakan dan diformulasikan oleh pemerintahan terpilih di Indonesia. RPJPN ini berjalan hingga tahun 2025). Rencana ini merupakan asas tunggal untuk kementerian dan lembaga pemerintah menyangkut

perumusan menyangkut perumusan rencana strategis mereka. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan rencana ini ketika merumuskan rencana pengembangan daerah.

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

RPJPM 2015-2019 adalah tahap yang ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (atau RPJPN 2005-2025). Rencana ini merupakan asas tunggal untuk kementerian dan lembaga pemerintah menyangkut perumusan Rencana strategis mereka. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan rencana ini ketika merumuskan rencana pengembangan daerah.

c. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3PEI)

MP3EI adalah sebuah masterplan yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011. MP3PEI itu juga bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar pada 2025.

2. PENYUSUNAN ANGGARAN APBN

a. Pengertian APBN

APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN ini merupakan rencana kerja pemerintah negara dalam rangka meningkatkan hasil-hasil pembangunan secara berkesinambungan serta melaksanakan desentralisasi fiskal.

APBN biasanya dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desembertahun anggaran.

Didalam APBN tercantum penerimaan dan pengeluaran serta pembiayaan dalam tahun anggaran yang direncanakan.

b. Fungsi APBN

- **Fungsi Alokasi**

- Berarti negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

- **Fungsi Distribusi**

Berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- **Fungsi Stabilisasi**

Memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

- **Fungsi Otoriasi**

Memiliki makna bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

- **Fungsi Perencanaan**

Memilik makna bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.

- **Fungsi Pengawasan**

Berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan,.

c. Tujuan APBN

Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan kegiatan kenegaraan untuk meningkatkan

produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan perlumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat.

d. **Prinsip Penyusunan APBN**

- **Berdasarkan aspek pendapatan**

- Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah kecepatan anggaran.
- Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang Negara.
- Penuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan penuntutan denda.

- **Berdasarkan aspek pengeluaran**

- Hemat, efisien berdasarkan anggaran.
- Teratah terkendali, sesuai rencana atau program/kegiatan.
- Maksimalisasi hasil produksi dalam negeri dan memperhatikan potensi nasional.

e. **Asas penyusunan APBN**

- a. Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.
- b. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
- c. Penajaman prioritas pembangunan.

f. **Landasan hukum APBN**

- UUD 1945 pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

g. **Komponen APBD**

a. **Pendapatan Negara dan Hibah**

Sesuai dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 17 yang menyatakan bahwa Pendapatan Negara terdiri atas :

1. Penerimaan Pajak
2. Penerimaan bukan pajak
3. Hibah

b. Belanja Negara

Belanja negara dapat dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Pemerintah Pusat
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

c. Pembiayaan Anggaran

Pembiayaan anggaran memiliki 2 komponen, yaitu :

1. Penerimaan Pembiayaan
2. Pengeluaran Pembiayaan

h. Tahap Penyusunan APBN

a. Perencanaan dan Penetapan

Di tahap ini pemerintah mempersiapkan rancangan APBN, meliputi perkiraan, penerimaan dan pengeluaran, skala prioritas, dan penyusunan budget exercise. Perencanaan dan Penyusunan RAPBN dilakukan pada setiap periode Januari-Juli ditahun sebelum pelaksanaan anggaran.

b. Pengajuan, Pembahasan dan Penetapan

RAPBN yang telah ditetapkan kemudian diajukan untuk melalui proses pembahasan oleh menteri keuangan, panitia anggaran DPR, dan mempertimbangkan masukan dai DPD. Hasil dari pembahasan RAPBN akan menjadi Undang-Undang APBN yang memuat satuan anggaran.

c. Pengawasan Pelaksanaan APBN

Pelaksanaan APBN akan diawasi pengawas fungsional dari eksternal maupun internal pemerintah.

d. Penanggungjawaban Pelaksanaan APBN

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan harus disampaikan pemerintah kepada DPR selambat-lambatnya 6 bulan usai tahun anggaran berakhir.

3. Penyusunan Anggaran APBD

a. Pengertian APBD

APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

b. Fungsi APBD

- **Fungsi Otorisasi**

Bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan.

- **Fungsi Perencanaan**

Bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

- **Fungsi Pengawasan**

Bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah.

- **Fungsi Alokasi**

Bermakna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya.

- **Fungsi Distribusi**

Memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- **Fungsi Stabilisasi**

Memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

c. Tujuan APBD

- a. Sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran dalam melaksanakan kegiatan daerah untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran bagi masyarakat daerah.
- b. Membantu pihak pemerintah daerah demi mencapai tujuan fiskalnya.
- c. Membantu menimbulkan prioritas belanja pemerintah daerah.
- d. Membantu meningkatkan dan juga menghadirkan transparansi pemda dalam penggunaan dana APBD kepada masyarakat dan juga mempertanggungjawabkannya ke DPRD.

d. Prinsip Penyusunan APBD

- a. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah
- b. Transparan, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD
- c. Memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan
- d. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Melibatkan partisipasi masyarakat
- f. Substansi APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

e. Komponen APBD**a. Anggaran Pendapatan Daerah**

1. Pos Pendapatan Asli Daerah
2. Pos Dana Perimbangan
3. Pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah

b. Anggaran Belanja Daerah

1. Pos Belanja Pegawai
2. Pos Belanja Barang dan Jasa
3. Pos Belanja Modal
4. Pos Belanja Lainnya

c. Anggaran Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan pembiayaan
2. Pengeluaran pembiayaan

f. Tahap Penyusunan APBD

a. Tahap Perancangan dan Pengajuan. APBD dirancang dan diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung.

b. Tahap Pembahasan dan Persetujuan. Rancangan APBD (RAPBD) akan dibahas oleh pemerintah daerah dengan usulan dari DPRD. Selain itu, DPRD juga akan memutuskan untuk setuju atau tidak mengenai RAPBD tersebut.

c. Tahapan Pelaksanaan.

Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, ketentuan lebih detail soal pelaksanaannya lebih lanjut akan dituangkan melalui keputusan gubernur/walikota/bupati.

d. Tahap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD. Penyampaian laporan ini telah diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No.9 Tahun 2015 tentang pemerintah daerah.

c. Rangkuman

Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Sistem perencanaan pembangunan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Ada 5 (lima) tujuan perencanaan pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 yaitu:

1. Mengkoordinasikan pelaku-pelaku pembangunan,
2. Mengintegrasikan, pembangunan, antar, daerah,,
3. Mengoptimalkan, partisipasi, masyarakat,
4. Memanfaatkan sumber daya dengan baik,
5. Menghubungkan, dan, menyelenggarakan, perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan dengan pengawasan.

Pemerataan menjadi isu penting dalam pelaksanaan pembangunan guna mengatasi melebarnya ketimpangan baik antar penduduk maupun antar wilayah karena pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi semata, namun juga mensejahterakan masyarakat yang termarjinalkan. Dalam hal itu, perlindungan sosial akan terus ditingkatkan dan dioptimalkan (Bappenas, 2014). Hal ini bukan hanya ditunjukkan untuk memenuhi kewajiban konstitusional, namun juga dilandasi pertimbangan untuk meningkatkan kualitas menuju SDM yang produktif, terdidik, terampil dan sehat, karena sumber daya manusia yang berkualitas merupakan pelaku dan *key enabler* dalam proses pembangunan.

Sistem anggaran tradisional (*Traditional Budgeting System*) adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Beberapa kelemahan Anggaran Tradisional antara lain: - Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang. - Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya. - Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan manipulasi anggaran. - Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan. Anggaran publik dengan pendekatan *New Publik Management (NPM)* mulai dikenal sejak tahun 1980-an yang mulai merubah sistem anggaran tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi lebih fleksibel dan mementingkan pasar.

d. Tugas

Tugas saat ini adalah mahasiswa diminta untuk mendownload APBN atau APBD daerah masing-masing. Pelajari ABPN atau APBD tersebut. Apakah ABPN atau APBD tersebut mencerminkan pencapaian tujuan kesejahteraan rakyat. Jelaskan pendapatmu?

e. Tes Formatif

1. Apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan?
2. Apa langkah-langkah atau tahapan dalam membuat perencanaan pembangunan nasional?
3. Apa itu rencana pembangunan pemerintah?
4. Bagaimana sistem perencanaan nasional?
5. Apa itu APBN dan APBD?
6. Apa tujuan Penyusunan APBN?

f. Kunci Jawaban

1. Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan yang melibatkan berbagai unsur di dalamnya guna pemanfaatan dan pengelolaan sumber-sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan.
2. Tahapan perencanaan pembangunan nasional meliputi:
 - a. Penyusunan rencana
 - b. Penetapan rencana
 - c. Pengendalian pelaksanaan rencana
 - d. Evaluasi pelaksanaan rencana
3. Rencana kerja pemerintah disingkat adalah rencana pembangunan tahunan nasional yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan rerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga.
4. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
5. APBN adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah Indonesia yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari DPR. APBN ini secara sistematis berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun periode anggaran 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Sedangkan APBD adalah suatu rancangan keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang

sebelumnya sudah mendapat persetujuan dari DPRD dan ditetapkan melalui peraturan daerah.

6. APBN disusun dengan sejumlah tujuan. Pertama, untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja agar kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi. Ketiga adalah untuk meningkatkan transparansi pemerintah kepada DPR dan masyarakat, sekaligus meningkatkan koordinasi antar bagian di dalam pemerintahan.

Kegiatan Belajar 7

TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami teknik akuntansi keuangan sektor publik

b. Uraian Materi

1. AKUNTANSI ANGGARAN

Akuntansi anggaran merupakan bagian dari ilmu akuntansi manajemen yang secara khusus digunakan untuk mengatur perencanaan dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual (*budgeting*). Menurut *Governmental Accounting Standards Board (GASB)*, definisi anggaran (*budget*) adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Akuntansi anggaran akan menguraikan aktivitas keuangan dalam jangka waktu tertentu yang dijalankan melalui sistem analisa dan pengawasan.

1.1. Pengertian Akuntansi Anggaran

Akuntansi anggaran adalah teknik akuntansi yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara berpasangan (*double entry*). Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dengan anggarannya.

Jumlah belanja yang dianggarkan dikreditkan terhadap akun yang sesuai kemudian apabila akun tersebut direalisasikan, maka akun tersebut di debit kembali. Saldo yang ada dengan demikian menunjukkan jumlah anggaran yang belum dibelanjakan. Teknik akuntansi anggaran dapat

membandingkan secara sistematis dan kontinyu jumlah anggaran dengan realisasi anggaran.

Alasan yang melatarbelakangi teknik akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat varians (selisih). Namun, akuntansi anggaran lebih menekankan pada bentuk akun-akun keuangan bukan isi (*content*) dari akun itu sendiri. Salah satu kelemahan teknik akuntansi anggaran adalah bahwa teknik ini sangat kompleks.

Akan lebih mudah dan lebih komprehensif apabila akun-akun yang ada menunjukkan pendapatan dan biaya aktual, dan anggaran menunjukkan pendapatan dan biaya dianggarkan.

1.2. Tujuan Akuntansi Anggaran

Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian dan akuntabilitas.

2. AKUNTANSI KOMITMEN

2.1. Pengertian Akuntansi Komitmen

Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan pencatatannya pada saat order dikeluarkan. Akuntansi komitmen dapat digunakan bersamaan dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Akuntansi komitmen terkadang hanya menjadi subsistem dari sistem akuntansi utama yang dipakai organisasi. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi melakukan transaksi tersebut. Hal ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika kas telah dibayarkan atau diterima, tidak juga ketika faktur diterima atau dikeluarkan, akan tetapi pada waktu yang lebih awal, yaitu ketika order dikeluarkan atau diterima.

Akuntansi komitmen berfokus pada order yang dikeluarkan. Order yang diterima terkait, dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam

pengadopsian sistem tersebut ke dalam akun-akun keuangan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh order yang dikeluarkan. Pada umumnya tidak ada kewajiban hukum (*legal liability*) untuk patuh terhadap order yang terjadi dan order tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. Hal ini menjadikan sulit untuk mengakui biaya-biaya untuk periode akuntansi yang bersangkutan yang mana hanya berdasarkan pada order yang dikeluarkan.

2.1. Tujuan Akuntansi Komitmen

Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggaran, ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan jika dihitung berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Dengan menerima akun atas faktur yang diterima atau dibayarkan, ia dapat dengan mudah menghabiskan anggaran (*overcommit*). Tentu saja manajer yang teliti akan tahu bahwa akun-akun tidak memasukan order yang dikeluarkan yang mana faktur belum diterima dan oleh karena itu ia membuat catatan sendiri agar ia tidak melakukan pemborosan anggaran (*over commit the budget*).

3. AKUNTANSI DANA

3.1. Pengertian Akuntansi Dana

Pada organisasi sektor publik masalah utama yang dihadapi adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana. Penggunaan dana dan peran anggaran sangat penting dalam organisasi sektor publik. Dalam tahap awal perkembangan akuntansi dana, pengertian “dana (*fund*)” dimaknai sebagai dana kas (*cash funds*). Tiap dana tersebut harus ditempatkan pada laci lain dan terpisah beberapa tagihan harus diambilkan dari satu laci dan tagihan lain di laci yang lainnya. Namun saat ini “dana” dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk sumber daya non kas dan utang diperhitungkan di dalamnya.

Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan untuk tujuan organisasi bisnis. Pada waktu itu ia melihat bahwa di antara perusahaan

pribadi dengan perusahaan bada memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut adalah: **Pertama**, perusahaan perorangan (milik pribadi) kurang menguntungkan dibandingkan perusahaan yang dimiliki publik (perseroan terbatas). **Kedua**, adanya kesalahan dalam memahami makna entitas. Berdasarkan kedua berpendapat terbut bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana dan organisasi harus dilihat sebagai suatu rangkaian dana, maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan (konsolidasi) dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi.

Sistem akuntansi pemerintah yang menggunakan konsep dana, memperlakukan suatu unit kerja sebagai entitas akuntansi dan entitas anggaran yang berdiri sendiri. Penggunaan akuntansi dana merupakan salah satu perbedaan antara akuntansi pemerintah dengan akuntansi bisnis.

Terdapat dua jenis dana yang dipergunakan pada organisasi sektor publik yaitu :

1. Dana yang dapat dibelanjakan (*expendable fund*) digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan (*governmental fund*).
2. Dana yang tidak dapat dibelanjakan (*nonexpendable fund*) untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis.

4. AKUNTANSI KAS

Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima, dan pengeluaran dicatat. Pada saat kas dikeluarkan. Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual, riil dan obyektif. Namun demikian GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan menggunakan kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang

sesungguhnya. Dengan *cash basis*, tingkat efisiensi dan efektivitas suatu kegiatan, program atau aktivitas, tidak dapat diukur dengan baik.

Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan (*revenue*) bukan sebagai utang. Untuk mengoreksi hal tersebut, kebanyakan sistem akuntansi kas tidak hanya mengakui kas saja, akan tetapi juga aktiva dan utang yang timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun demikian, koreksi semacam ini tidak dapat mengubah kenyataan bahwa pada setiap waktu, obligasi yang beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang dikeluarkan tidak tampak dalam catatan akuntansi. Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat lebih (*overstated*). Hal tersebut dapat menyebabkan pemborosan anggaran.

5. AKUNTANSI AKRUAL

Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antara dana kepemilikan (*full accrual*) dengan dana pemerintah (*modified accrual*) karena biaya (*expense*) diukur dalam dana kepemilikan sedangkan pengeluaran difokuskan pada dana umum. Pengeluaran (*Expense*) adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Karena dana pemerintahan tidak memiliki catatan modal dan utang (dicatat/dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang jangka panjang) *expenditure* yang diukur bukan *expense*.

Pengaplikasian *accrual basis* dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan *cost of services* dan *charging for service*, yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang digunakan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan kepada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian *accrual basis* dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan.

Akuntansi berbasis akrual membedakan antara pemerintah kas dan hak untuk mendapatkan kas, serta pengeluaran kas dan kewajiban untuk membayarkan kas. Oleh karena itu, dengan sistem akrual pendapatan dan biaya diakui pada saat diperoleh (*earned*) atau terjadi (*incurred*), tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan.

c. Rangkuman

Berdasarkan teori entitas, perusahaan atau suatu organisasi merupakan entitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari pemiliknya. Akuntansi hadir untuk menjamin pertanggungjawaban dan akuntabilitas suatu entitas atas pengelolaannya terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, kehadiran akuntansi pada organisasi sektor publik yaitu sebagai alat pengendalian transaksi keuangan dan juga mendukung pencapaian tujuan organisasi sektor publik.

Akuntansi terdiri dari proses pengidentifikasian, pengakuan, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi atau kejadian-kejadian ekonomi yang menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Secara umum, teknik-teknik akuntansi meliputi tiga hal yaitu pengakuan, pengukuran dan pengungkapan. Pengakuan meliputi proses pengidentifikasian dengan memastikan bahwa suatu transaksi atau kejadian apakah merupakan kejadian ekonomi.

Pengakuan juga meliputi pengidentifikasian apakah suatu transaksi kejadian ekonomi sudah bisa diakui atau belum berdasarkan kriteria tertentu yang berlandaskan pada asumsi basis akuntansi yang digunakan. Selanjutnya, pengukuran yaitu apakah kejadian ekonomi tersebut dapat diukur dengan ukuran moneter atau nilai uang dan jika tidak maka transaksi tersebut tidak akan dicatat. Pengungkapan meliputi pencatatan jurnal hingga penyusunan laporan keuangan.

Terdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat diadopsi di sektor publik yaitu:

1. akuntansi anggaran atau (*budgetary accounting*)
2. akuntansi komitmen (*commitment accounting*)

3. akuntansi dana (*fund accounting*)
4. akuntansi kas (*cash accounting*)
5. akuntansi akrual (*accrual accounting*)

Pada dasarnya kalimat teknik akuntansi tersebut tidak bersifat mutually eksklusif, artinya, penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak menolak penggunaan teknik akuntansi lainnya. Dengan, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, Bahkan dapat menggunakan kalimat teknik dalam waktu yang bersamaan.

Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen berbeda satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam hal pengakuan pendapatan, pada dasarnya terdapat dua langkah yang mempengaruhi pencatatan, yaitu pada saat barang dikirim dan faktur dikeluarkan, dan pada saat barang dikirim dan faktur dibayar.

d. Tugas

Silahkan mereview artikel tentang teknik akuntansi keuangan sektor publik. Review dilakukan dengan menggunakan pola yang umum dilakukan yaitu jelaskan tentang: latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, objek penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, simpulan penelitian, kelebihan dan kekurangan penelitian.

e. Tes Formatif

1. Apa yang dimaksud dengan akuntansi anggaran?
2. Apa kegiatan dan tujuan akuntansi anggaran?
3. Apa yang dimaksud akuntansi komitmen?
4. Apa yang dimaksud dengan akuntansi dana?
5. Apa yang dimaksud dengan akuntansi kas?
6. Apa yang dimaksud dengan akuntansi akrual?

f. Kunci Jawaban

1. Pengertian akuntansi anggaran adalah teknik akuntansi yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dan terdapat pada setiap anggaran mulai dari anggaran yang disahkan, dialokasikan, ataupun yang dilaksanakan sampai pada penutupan buku anggaran akhir tahun.
2. Tujuan akuntansi anggaran adalah untuk mencegah terjadinya kelebihan anggaran yang tak terduga (*over budget*).
3. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk mengatur bank dalam mengelola aktiva dan kewajibannya termasuk dalam pengelolaan alat liquid agar memenuhi kewajiban yang memungkinkannya membutuhkan waktu yang lama baik dalam waktu beberapa hari, bulan yang terkait dengan bagian yang akan diterima.
4. Akuntansi dana adalah sistem akuntansi yang digunakan oleh organisasi nirlaba dan pemerintah, untuk melacak kas yang digunakan ke berbagai tujuan dan penggunaan yang berbeda dari kasus tersebut.
5. Metode akuntansi adalah metode yang berbasis dasar tunai yaitu pencatatan pendapatan organisasi dilakukan saat pembayaran diterima selanjutnya pengeluaran bisnis atau organisasi akan dicatat saat dibayar.
6. Basis akrual atau asas akrual adalah suatu basis akuntansi yaitu transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan berdasarkan pengaruh transaksi pada saat terjadinya transaksi tersebut tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan.

Kegiatan Belajar 8

UJIAN TENGAH SEMESTER

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Untuk evaluasi pembelajaran pertama sampai ke tujuh

b. Uraian Materi

Materi Ujian Tengah Semester adalah materi pembelajaran pertama sampai dengan pembelajaran ke tujuh.

1. Petunjuk Ujian Tengah Semester

- a. Siapkan lembar jawaban dengan menggunakan kerta bergaris folio.
- b. Tulis identitas Anda di pojok kiri atas, yaitu: 1). Nomor Urut Absen, 2). Nama Mahasiswa, 3). Nomor Induk Mahasiswa, 4). Mata Kuliah dan kelas.
- c. Tulis Tanggal Ujian di pojok kanan atas.

2. Soal Ujian Tengah Semester

Jawablah pertanyaan berikut ini:

1. Apa yang Anda ketahui tentang Akuntansi Sektor Publik?
2. Apa perbedaan antara organisasi sektor publik dan organisasi swasta?
3. Jelaskan perkembangan regulasi di sektor publik!
4. Bagaimana tahapan penyusunan regulasi sektor publik. Jelaskan!
5. Bagaimana penerapan Akuntansi Manajemen Sektor Publik?
6. Menurut Anda, prioritas anggaran pemerintah itu diprioritaskan ke bidang apa? Jelaskan!
7. Jelaskan Teknik-teknik Akuntansi Sektor Publik!
8. Jelaskan basis-basis akuntansi yang digunakan di Akuntansi Sektor Publik!

Kegiatan Belajar 9

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK (Bagian 1)

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami laporan keuangan sektor publik, konsep, tujuan dan fungsi serta pengguna laporan keuangan Sektor Publik.

b. Uraian Materi

1. Pengertian Laporan Keuangan Sektor Publik

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi terstruktur posisi keuangan akibat transaksi yang dilakukan. Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik. Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi berupa laporan keuangan.

Akuntansi secara normatif mempunyai 3 (tiga) aspek yaitu:

1. Sifat informasi yang diberikan.
2. Pihak yang menerima atau memakai informasi.
3. Tujuan informasi diberikan. Organisasi sektor publik dituntut untuk membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi :
 1. Laporan realisasi anggaran.
 2. Laporan arus kas.
 3. Neraca.
 4. Catatan atas laporan keuangan.

Beberapa alasan pembuatan laporan keuangan:

1. Dari sisi internal: alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

2. Dari sisi eksternal: mekanisme pertanggung jawaban dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.
3. Tujuan informasi diberikan

2. Tujuan dan Fungsi Laporan Keuangan Sektor Publik

1. Kepatuhan dan pengelolaan (*compliance and stewardship*)
2. Akuntabilitas dan pelaporan restrospektif (*accountability and restrospective reporting*).
3. Perencanaan dan informasi otorisasi (*planning and authorization information*).
4. Kelangsungan organisasi (*viability*).
5. Hubungan masyarakat (*public relation*).
6. Sumber fakta dan gambaran (*source of facts and figures*)

Bagi organisasi pemerintah, tujuan umum akuntansi dan laporan keuangan adalah:

1. Memberikan informasi yang digunakan untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban (*accountability*) dan pengelolaan (*stewardship*).
2. Untuk memberikan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk:

1. Membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan.
2. Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi.
3. Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya.
4. Membantu dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas.

Laporan keuangan sebagai sumber informasi finansial memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan. Tujuan akuntansi dan laporan keuangan organisasi pemerintah:

1. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi aliran kas, saldo neraca, dan kebutuhan sumber daya finansial jangka pendek unit pemerintah.
2. Memberikan informasi keuangan untuk menentukan dan memprediksi kondisi ekonomi suatu unit pemerintah dan perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya.
3. Memberikan informasi keuangan untuk memonitor kinerja, kesesuaiannya dengan peraturan perundangundangan, kontrak yang telah disepakati, dan ketentuan lain yang disyaratkan.

Kinerja Manajerial dan Organisasi

Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai berdasarkan laba yang diperoleh, karena organisasi pemerintah bukan entitas bisnis yang mencari laba. Pemerintah bertanggung jawab atas produksi dan distribusi barang dan jasa publik.

Tujuan laporan keuangan organisasi nirlaba menurut *statement of financial accounting concepts* No 4 (SFAC 4).

- Bermanfaat bagi penyusunan keputusan yang rasional.
- Untuk menilai pelayanan.
- Menilai kinerja manajer organisasi.
- Memberi informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban dan kekayaan.
- Informasi kinerja selama satu periode.
- Informasi cara memperoleh dan membelanjakan kas.
- Memberi penjelasan dan interpretasi.

3. Pemakai Laporan Keuangan Sektor Publik

Pemakai laporan keuangan terdapat beberapa pengklasifikasian. Berikut ini diidentifikasi terdapat 10 (sepuluh) kelompok pemakai laporan keuangan.

1. Pembayar pajak (*taxpayers*).
2. Pemberi dana bantuan (*grantors*).
3. Investor.
4. Pengguna jasa (*fee-paying service recipients*).
5. Karyawan/pegawai.
6. Pemasok (*vendor*).
7. Dewan legislatif.
8. Manajemen.
9. Pemilih (*voters*).
10. Badan pengawas.

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 5 (lima) kelompok, yaitu :

1. Lembaga pemerintah (*governing bodies*).
2. Investor dan kreditor.
3. Pemberi sumber daya (*resource providers*).
4. Badan pengawas (*oversight bodies*).
5. Konstituen.

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 12 (dua belas) kelompok, yaitu:

1. Anggota terpilih (*elected members*).
2. Masyarakat sebagai pemilih dan/atau pembayar pajak.
3. Pelanggan atau klien.
4. Karyawan/pegawai.
5. Pelanggan dan pemasok.
6. Pemerintah.
7. Pesaing (*competitors*).
8. Regulator.

9. Pemberi pinjaman.
10. Donor dan sponsor. Anggota terpilih (*selected members*).
11. Investor atau partner bisnis.
12. Kelompok penekan lainnya

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan sektor publik menjadi 11 (sebelas) kelompok, yaitu:

1. Masyarakat pengguna jasa publik.
2. Masyarakat pembayar pajak.
3. Perusahaan dan organisasi sosial ekonomi yang menggunakan pelayanan publik sebagai input atas aktivitas organisasi.
4. Bank dan masyarakat sebagai kreditor pemerintah.
5. Badan-badan internasional, seperti bank dunia, IMF, ADB, PBB dan lain sebagainya.
6. Investor asing.
7. Generasi yang akan datang.
8. Lembaga negara.
9. Kelompok politik (partai politik)
10. Manajer publik (gubernur, bupati, direktur BUMN/bumda).
11. Pegawai pemerintah.

Serikat dagang sektor publik mengidentifikasi pemakai laporan pemerintah menjadi 3 (tiga) kelompok besar, yaitu:

1. Masyarakat yang kepadanya pemerintah bertanggung jawab.
2. Legislatif dan badan pengawas yang secara langsung mewakili rakyat.
3. Investor dan kreditor yang memberi pinjaman dan/atau berpartisipasi dalam proses pemberi pinjaman.

Tugas untuk menyediakan informasi bagi internal organisasi dan eksternal ini adalah tugas dari seorang akuntan sektor publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban yang diberikan kepada pihak yang diberikan

tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilaksanakan, yang sudah menjadi tanggung jawab kepada pihak yang sudah memberikan amanah.

Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam, yaitu:

a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada pihak yang lebih tinggi atas pengelolaan dana.

Contohnya, pertanggungjawaban unit pengelolaan kedinasan kepada aparat pemerintahan, pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.

b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada pihak masyarakat luas atas pengelolaan dana.

Fungsi Dan Tujuan Laporan Keuangan Sektor Publik

Secara umum, laporan keuangan sektor publik memiliki fungsi sebagai berikut:

Kepatuhan dan Pengelolaan

Dengan membuat laporan keuangan berarti sudah menjadi jaminan kepada pihak pengguna laporan keuangan dan pihak otorisasi penguasa bahwa pengelolaan keuangan sudah dilakukan dengan baik, sesuai dengan hukum dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif

Laporan keuangan digunakan untuk pertanggungjawaban kepada publik untuk:

- Mengetahui kinerja dan evaluasi dari manajemen.
- Mengetahui pencapaian atas target yang sudah ditetapkan.

- Membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis.
- Memungkinkan untuk pihak luar mengetahui biaya atas barang dan jasa yang telah diterima.
- Mengetahui efisiensi sumber daya yang telah digunakan oleh organisasi.

Perencanaan dan Informasi Otorisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk membuat perencanaan, kebijakan dan aktivitas di masa yang akan datang dan digunakan untuk mencari informasi pendukung tentang otorisasi penggunaan dana.

Kelangsungan Organisasi

Laporan keuangan berfungsi untuk mengetahui kelangsungan organisasi apakah masih mampu dalam hal menyediakan barang dan jasa atau tidak.

c. Rangkuman

Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tersebut.

Fenomena perkembangan sektor publik sekarang ini dapat dilihat dari semakin menguatnya pelaksanaan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan adanya akuntabilitas sektor publik ini terkait dengan dua hal, yaitu transparansi dan pemberian informasi kepada publik untuk pemenuhan hak-hak kepada publik. Kompleksitas dari sektor publik tersebut mengakibatkan kebutuhan akan informasi untuk perencanaan dan pengendalian dalam manajemen lebih bervariasi.

d. Tugas

Untuk menambah kemampuan mahasiswa memahami laporan keuangan sektor publik. Mahasiswa diharapkan bisa mendapatkan laporan keuangan sektor publik pada organisasi publik di kota tempat tinggal Anda.

e. Tes Formatif

1. Apa itu laporan keuangan sektor publik?
2. Kenapa organisasi sektor publik harus membuat laporan keuangan?
3. Siapa saja yang memakai laporan keuangan sektor publik?
4. Apakah tujuan akuntansi dan laporan keuangan sektor publik bagi pemerintah?

f. Kunci Jawaban

1. Laporan keuangan sektor publik merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik. Laporan keuangan sektor publik ini menjadi komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik tersebut.
2. Laporan keuangan digunakan untuk pertanggungjawaban kepada publik untuk mengetahui kinerja dan evaluasi manajemen mengetahui pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dan membandingkan dengan organisasi lain yang sejenis
3. Pemakai laporan keuangan sektor publik adalah membayar pajak, pemberi dana bantuan, investor, dan pengguna jasa.
4. Berdasarkan American accounting Association, tujuan utama akuntansi untuk sektor publik adalah untuk memberikan informasi dan laporan pengelolaan keuangan. Selanjutnya laporan ini akan digunakan untuk pengendalian manajemen sebagai pertanggungjawaban.

Kegiatan Belajar 10

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK (Bagian 2)

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami Laporan Keuangan Sektor Publik, perbedaan laporan keuangan, dampak dan bentuk-bentuk laporan keuangan.

b. Uraian Materi

1. Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik dan Swasta

Pengelolaan laporan keuangan oleh sektor publik dan swasta memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, elemen, tujuan, dan teknik akuntansi yang digunakan.

Laporan Keuangan Sektor Publik	Laporan Keuangan Swasta
Fokus Finansial dan politik	Fokus finansial
Kinerja diukur secara finansial dan non- finansial	Sebagian besar kinerja diukur secara finansial
Pertanggungjawaban kepada parlemen dan masyarakat luas	Pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditur
Berfokus pada bagian organisasi	Berfokus pada organisasi secara keseluruhan
Melihat kemasa depan secara detail	Tidak dapat melihat masa depan secara detail
Aturan pelaporan ditentukan oleh departemen keuangan	Aturan pelaporan ditentukan oleh undang-undang, standar akuntansi, pasar modal dan praktik akuntansi
Laporan diperiksa oleh trasury	Laporan keuangan diperiksa oleh auditor independen
Cash Accounting	Accrual accounting

2. Dampak Laporan Keuangan Sektor Publik

Dampak jika laporan keuangan organisasi sektor publik buruk, maka akan menyebabkan :

- a. Kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana publik (pemerintah) akan menurun
- b. Penanam modal atau investor tidak berani menanamkan modalnya lagi.
- c. Para donatur atau penyumbang dana akan mengurangi atau menghentikan bantuannya.
- d. Mempengaruhi pengambilan keputusan.
- e. Laporan keuangan tidak dapat untuk mengukur kinerja

3. Bentuk – Bentuk Laporan Keuangan

1) Laporan Kinerja Keuangan/ Surplus – Defisit

Pada laporan ini mirip dengan laporan rugi-laba pada entitas bisnis. Laporan surplus–defisit menggambarkan kinerja keuangan pada organisasi sektor publik, yaitu ketika total pendapatan/ penerimaan lebih besar daripada total biaya/belanja disebut surplus dan sebaliknya disebut defisit. Laporan ini juga disebut dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan surplus rugi, dan laporan operasi. Format laporan kinerja keuangan/Surplus – Defisit dapat dilihat di SAP.

2) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Format LRA dapat dilihat di SAP.

3) Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan ini menyajikan informasi yang berkaitan dengan kejadian yang menyebabkan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Laporan ini diawali dari ekuitas awal periode kemudian melaporkan kejadian-kejadian yang menyebabkan kenaikan atau penurunan ekuitas pemilik. Format Laporan Perubahan Ekuitas dapat dilihat di SAP.

4) Laporan Posisi Keuangan atau Neraca

Laporan yang memberikan gambaran entitas sektor publik secara utuh pada suatu waktu tertentu, dimana didalamnya tergambar elemen-elemen yang menyusun entitas sektor publik tersebut sehingga laporan posisi keuangan/neraca sering disebut dengan potret posisi keuangan suatu entitas sektor publik. Format laporan posisi keuangan atau neraca dapat dilihat di SAP.

5) Laporan Arus Kas

Laporan yang menggambarkan perubahan posisi kas dalam satu periode akuntansi, pada laporan ini perubahannya akan dilihat dari kegiatan operasi, pendanaan dan investasi.

Terdapat dua metode dalam menyajikan arus kas yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Format laporan arus kas dapat dilihat di SAP.

c. Rangkuman

Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan. Akuntansi sektor publik bertujuan untuk

memberikan informasi yang bertujuan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik, dan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan serta untuk memberi informasi yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasional.

Terdapat perbedaan antara karakteristik pengelolaan keuangan maupun pembuatan laporan keuangan oleh institusi pemerintah atau (sektor publik) dan non pemerintah (sektor swasta). Apa saja perbedaannya?

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengolahan, dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi.

Namun, informasi di sektor publik lebih bervariasi, maka informasi tidak terbatas pada informasi keuangan tetapi juga informasi moneter. Sektor publik adalah gabungan dari berbagai macam organisasi yang kompleks dan banyak jenisnya mulai dari pemerintahan, badan usaha milik negara dan masyarakat.

Demikian juga yang termasuk dalam *stakeholder* sektor publik, mereka lebih membutuhkan akan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan untuk pengambilan sebuah keputusan. Pengelolaan laporan keuangan oleh institusi pemerintah (sektor publik) dan non pemerintah (sektor swasta) memiliki perbedaan.

Perbedaan tersebut meliputi perbedaan jenis-jenis laporan keuangan, elemen laporan keuangan, tujuan laporan keuangan, dan teknik akuntansi yang digunakan. Di samping memiliki beberapa perbedaan karakteristik, keduanya juga memiliki persamaan yaitu membutuhkan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman untuk membuat laporan keuangan. Sektor akuntansi pada kedua sektor tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan.

d. Tugas

Silahkan mereview artikel tentang laporan keuangan sektor publik. Review dilakukan dengan menggunakan pola yang umum dilakukan yaitu jelaskan tentang: latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, objek penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, simpulan penelitian, kelebihan dan kekurangan penelitian.

e. Tes Formatif

1. Apa perbedaan akuntansi sektor publik dan swasta?
2. Terdiri dari apa saja laporan keuangan sektor publik?

f. Kunci Jawaban

1. Perbedaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta adalah motif keuntungan. Akuntansi sektor publik hanya memenuhi kebutuhan publik tanpa motif mencari keuntungan. Sedangkan akuntansi swasta pasti akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya.
2. Laporan keuangan yang harus dibuat oleh organisasi sektor publik meliputi laporan keuangan formal seperti:
 - a. Laporan surplus defisit
 - b. Laporan realisasi anggaran
 - c. Laporan laba rugi
 - d. Laporan arus kas
 - e. Laporan neraca
 - f. Laporan kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan nonfinansial

Kegiatan Belajar 11

PENGUKURAN KINERJA SEKTOR PUBLIK

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami pengukuran kinerja Sektor Publik.

b. Uraian Materi

1. Pengertian dan Tujuan Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Kinerja pada sektor publik melalui sistem dan pengukuran yang menjembati suatu keadaan yang dapat mengembangkan suatu pencapaian kinerja dan mengiringi laju perkembangan tolak ukur keuangan. Landasan mengenai pengukuran kinerja organisasi mencapai batasan yang tak terhingga dan sesuai dengan target kinerja pada organisasi. Organisasi sektor publik merupakan suatu landasan yang riil atau nyata yang kompeten pada anggota masing – masing yang memiliki ilmu serta wawasan yang luas serta membantu keadaan serta kelayakan pada situasi tertentu.

Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial. Pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment systems. Tujuan pengukuran kinerja sektor publik:

- 1) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (*top down and bottom up*)
- 2) Untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur berkembang pencapaian strateginya

- 3) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta motivasi untuk mencapai *good congruence*
- 4) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional

2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses mencatat, mengukur pencapaian pelaksanaan kegiatan dan anggaran dalam arah pencapaian misi melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa produk, jasa, ataupun suatu proses pelayanan publik. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik dalam bentuk tindakan yang efektif dan efisien dan akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan atau organisasi memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian. Pengukuran kinerja terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tradisional dan kontemporer. Pengukuran kinerja tradisional dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan atau biaya standar sesuai dengan karakteristik pertanggung jawabannya. Pengukuran kinerja kontemporer menggunakan aktivitas sebagai pondasinya. Ukuran kinerja dirancang untuk menilai seberapa baik aktivitas dilakukan dan dapat mengidentifikasi apakah telah dilakukan perbaikan yang berkesinambungan.

3. Elemen Pokok Pengukuran Kinerja Sektor Publik

- 1) Menetapkan tujuan, sasaran, dan strategi organisasi.
- 2) Merumuskan indikator dan ukuran kinerja.
- 3) Mengukur tingkat ketercapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasi.
- 4) Evaluasi kinerja *feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

4. Informasi Yang Digunakan Untuk Mengukur Kinerja Sektor Publik

1) Informasi Finansial

Penilaian kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat. Penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varians (selisih atau perbedaan) antara aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varians secara garis besar berfokus pada:

- a) Varians pendapatan (*revenue variance*)
- b) Varians pengeluaran (*expenditure variance*)
- c) Varians belanja rutin (*recurrent expenditure variance*)
- d) Varians belanja investasi/modal (*capital expenditure variance*)

Setelah dilakukan analisis varians, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varians dengan menelusuri varians tersebut hingga level manajemen paling bawah.

2) Informasi Nonfinansial

Informasi nonfinansial dapat dijadikan sebagai tolok ukur lainnya. Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Teknik pengukuran kinerja yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh berbagai organisasi saat ini adalah *balance scorecard*. Dengan *balance scorecard* kinerja organisasi diukur tidak hanya berdasarkan aspek finansial saja. Akan tetapi juga dari sisi aspek nonfinansial. Pengukuran dengan metode *balance scorecard* melibatkan empat aspek, yaitu:

- a) Perspektif finansial (*financial perspective*)
- b) Perspektif kepuasan pelanggan (*customer perspective*)
- c) Perspektif efisiensi proses internal (*internal process efficiency*)
- d) Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

5. Peran Indikator Dalam Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Indikator Kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan dari strategi yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja tersebut dapat berbentuk;

1) Faktor Keberhasilan Utama

Faktor Keberhasilan Utama adalah suatu area yang mengidentifikasi kesuksesan kinerja unit organisasi.

2) Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci adalah sekumpulan indikator yang dapat dianggap sebagai ukuran kinerja kunci baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial untuk melaksanakan operasi dan kinerja unit bisnis.

3) Pengembangan Indikator kinerja

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktifitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Penentuan Indikator Kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut:

- a. Biaya Pelayanan (*cost of service*)
- b. Penggunaan (*utilization*)
- c. Kualitas dan standar pelayanan (*quality and standartds*)
- d. Cakupan Pelayanan (*converage*)
- e. Kepuasan (*satisfaction*)

Pengukuran Kinerja Sektor Publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu:

- 1) Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran

program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian Pelayanan publik.

- 2) Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan.
- 3) Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

c. Rangkuman

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, Sehingga tidak ada indikator tunggal yang dapat digunakan untuk menunjukkan kinerja secara komperhensif. Berbeda dengan sektor swasta, karena sifat output yang dihasilkan sektor publik lebih banyak bersifat *ingtangible output*, maka ukuran finansial saja tidak cukup untuk mengukur kinerja sektor publik. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ukuran kinerja non-finansial.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial & nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian, karena organisasi dapat menetapkan reward & punishment.

Maksud pengukuran kinerja sektor publik:

1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah
2. Digunakan untuk pengalokasian sumber daya & pembuatan keputusan
3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik & memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Kinerja sektor publik bersifat multidimensional, artinya tidak ada indikator tunggal untuk menunjukkan kinerja, dan banyak bersifat intangible output.

Tujuan sistem pengukuran kinerja:

1. Mengkomunikasikan strategi secara lebih baik.
2. Menyeimbangkan ukuran kinerja finansial & non-finansial.
3. Mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta memotivasi pencapaian *goal congruence*.
4. Alat mencapai kepuasan individu maupun kolektif yang rasional.

Manfaat pengukuran kinerja:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
4. Dasar memberikan *reward* dan *punishment* secara objektif yang diukur dengan ukuran kinerja yg disepakati.
5. Alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif

d. Tugas

Menurut pengamatan mahasiswa, bagaimana kinerja pemerintah daerah kota tempat Anda berasal? Jelaskan dengan menggunakan indikator kinerja yang dipelajari.

e. Tes Formatif

1. Apa itu kinerja publik?
2. Mengapa pengukuran kinerja membutuhkan indikator kinerja?
3. Apa itu sistem pengukuran kinerja sektor publik?
4. Apa maksud pengukuran kinerja sektor publik?
5. Apa manfaat pengukuran kinerja?
6. Bagaimana melakukan pengukuran kinerja finansial?
7. Pengukuran kinerja *Balanced Scorecard* dapat dilihat dari aspek apa saja?

f. Kunci Jawaban

1. Kinerja organisasi publik adalah tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau aktivitas atau program yang telah ditentukan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi organisasi. Sasaran, tujuan, visi, misi organisasi ini dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu.
2. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, dan strategi. *critical success factors* (faktor keberhasilan utama) adalah suatu area yang mengindikasikan kesuksesan kinerja unit kerja organisasi.
3. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang bertujuan membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial & nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian, karena organisasi dapat menetapkan *reward & punishment*.
4. Maksud pengukuran kinerja sektor publik: a). Membantu memperbaiki kinerja pemerintah b). Digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan c). Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Kinerja sektor publik bersifat

multidimensional, artinya tidak ada indikator tunggal untuk menunjukkan kinerja, dan banyak bersifat *intangible output*.

5. Manfaat pengukuran kinerja:
 1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja.
 2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
 3. Memonitor & mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.
 4. Dasar memberikan *reward* dan *punishment* secara objektif yang diukur dengan ukuran kinerja yg disepakati.
 5. Alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
 6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi
 7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah
 8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.

6. Penilaian kinerja finansial dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis Varians:
 1. Varians Pendapatan
 2. Varians Pengeluaran/Belanja
 3. Varians Pembiayaan

7. Pengukuran dengan Balanced Scorecard melibatkan aspek:
 1. Perspektif Finansial
 2. Perspektif Kepuasan Pelanggan
 3. Perspektif Efisiensi Proses Internal
 4. Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan.

Kegiatan Belajar 12

AKUNTANSI DESA

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami gambaran umum pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa

b. Uraian Materi

1. Gambaran Umum Pemerintahan Desa

Untuk bisa memahami laporan keuangan desa, maka perlu dijelaskan tentang gambaran umum pemerintahan desa. Pemerintahan Desa adalah suatu proses pemaduan usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 23, ditegaskan bahwa Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa.

Kepala desa sebagai pemimpin di desanya mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Mengajukan rancangan peraturan desa.
- Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- Membina kehidupan masyarakat desa.
- Membina perekonomian desa.
- Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.

- Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk -mewakili sesuai dengan peraturan perundang undangan.
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Selain kewenangan, kepala desa juga dibebani tugas sebagai berikut:

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta -mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang undangan.
- Menyelenggarakan administrasi pemerintahan

Kepala desa dapat melaksanakan kewenangan dan tugasnya, maka perlu dilengkapi dengan perangkat desa. Dalam struktur organisasi desa, Kepala Desa juga dibantu oleh perangkat desa yang terdiri atas:

- Carik (Sekdes/Sekretaris) = adalah pelaksana sekretaris desa
- Kebayan = tugasnya merupakan mengurus data-data desa
- Lado = tugasnya merupakan dalam hal irigasi
- Modin = tugasnya merupakan dalam hal keagamaan
- Petengan = merupakan komandan keamanan alias komandan hansip
- Kamituwo = yang mengurus bengkok dan tanah.

Kepala Desa yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan desa. Wakil pemerintah sebagaimana dimaksud adalah perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka dekonsentrasi. Tugas dan wewenang kepala desa sebagai wakil pemerintah kecamatan adalah:

1. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di desa;
3. Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di desa.

Dalam kedudukannya tersebut, kepala desa bertanggung jawab kepada Kepala Camat.

2. Pengertian Keuangan Desa

Pengertian Keuangan Desa menurut UU Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan, pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

3. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk melakukan pengelolaan keuangan desa, kepala desa dibantu oleh perangkat desa sebagai berikut:

- Kepala Desa
- Sekertaris Desa
- Kepala Seksi
- Kaur Keuangan/Bendahara Desa

4. Asas Keuangan Desa

Keuangan Desa terdiri dari 4 (empat) asas, agar bisa dikelola, asas tersebut terdiri dari:

1. Asas Transparan

Dalam pengelolaan keuangan, informasi keuangan harus diterbitkan secara terbuka dan penyajiannya harus dilakukan dengan jujur oleh pihak yang berwenang.

2. Asas Akuntabel

APBDesa dilaporkan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berwenang, sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

3. Asas Partisipatif

Tahapan pengelolaan keuangan desa dari awal hingga akhir harus melibatkan peran serta masyarakat didalamnya.

4. Asas Tertib dan disiplin anggaran

Tertib dan disiplin anggaran diartikan bahwa anggaran yang dibuat harus dilaksanakan secara konsisten.

5. Pengelolaan Keuangan Desa

Kegiatan secara keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasar pada hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang memperoleh sumber dana dari APB Desa.

Pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan

3. Penatausahaan
4. Pelaporan
5. Pertanggungjawaban

6. Laporan Keuangan Desa

Laporan keuangan desa merupakan hasil akhir dari sebuah proses pencatatan transaksi keuangan yang dilaksanakan aparatur desa. Laporan Keuangan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa saat ini masih menggunakan basis kas dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Sesuai dengan perkembangan jaman, Laporan Keuangan Desa diarahkan menggunakan basis akrual dalam menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan atas aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Salah satu tujuan Laporan keuangan Desa disusun yaitu dalam rangka menyajikan informasi realisasi anggaran dan posisi keuangan pemerintah desa yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi kebijakan/keputusan lalu dan merencanakan kebijakan di masa yang akan datang. Selain itu, laporan keuangan pemerintah desa sebagai bentuk pertanggungjawaban (akuntabilitas) pemerintah desa atas sumber daya yang dikelola atau dipercayakan kepada pemerintah desa.

7. Pembuatan Anggaran dan Proposal Dusun

Dana yang akan digulirkan dari pemerintah sebesar 10% dari APBN ini akan diberikan secara langsung kepada desa-desa. Kemudian tiap desa akan mengalirkan dana-dana tersebut kepada dusun-dusun di bawah desa. Agar dana yang mengalir dari desa ke masing-masing dusun dapat dipertanggungjawabkan maka perlu dibuat anggaran masing-masing dusun beserta proposal kegiatannya.

c. Rangkuman

Sistem akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa yang dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dengan pelaporan keuangan sehingga akan dihasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa yaitu masyarakat desa.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan Desa yang merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa, dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dengan memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa khususnya dalam pengelolaan keuangan Desa yang transparan dan bertanggung jawab, diperlukan pengaturan mengenai pertanggungjawaban keuangan Desa.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan Desa diwujudkan dalam Laporan Keuangan Pemerintahan Desa. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban keuangan Desa yang memadai, Laporan Keuangan Pemerintahan Desa disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa).

e. Tugas

Mahasiswa diminta untuk melakukan survey kecil-kecilan tentang laporan keuangan desa di kota Anda. Desa apa saja yang telah menyusun laporan keuangan desa. Apa kendala yang dialami oleh aparat desa dalam

menyusun laporan keuangan desa? Survey ini bisa dilakukan dengan menggunakan *google form*.

f. Tes Formatif

1. Apa itu akuntansi desa?
2. Standar akuntansi apakah yang cocok untuk desa?
3. Apa yang dimaksud dengan akuntansi desa dan keuangan desa?
4. Siapa yang menyusun SAP desa?

g. Kunci Jawaban

1. Sistem akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di Desa, dibuktikan dengan nota nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan dihasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan masyarakat yaitu masyarakat desa perangkat desa, pemerintah Kecamatan maupun kabupaten kota sebagai pertanggungjawaban.
2. Desa seharusnya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntansi pengelolaan keuangannya kepada publik. Standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa adalah standar akuntansi pemerintahan (SAP).
3. Akuntansi desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di Desa, dibuktikan dengan nota nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.
4. SAP desa tersebut disusun oleh komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Kegiatan Belajar 13

SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami Akuntansi Pemerintah Pusat.

b. Uraian Materi

1. Seluk Beluk Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Pengertian

- Sistem adalah kumpulan elemen yang saling berkaitan dan bekerjasama dalam melakukan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.
- Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat.

2. Ruang Lingkup SAPP

Ruang lingkup SAPP adalah pemerintah pusat (dalam hal ini lembaga tinggi Negara dan lembaga eksekutif) serta pemda yang mendapatkan dana dari APBN (terkait dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan) sehingga tidak dapat diterapkan untuk lingkungan pemda atau lembaga keuangan Negara.

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku untuk seluruh unit organisasi pada Pemerintah Pusat dan unit akuntansi pada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan yang dananya bersumber dari APBN serta pelaksanaan Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan.

Tidak termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Menteri Keuangan ini adalah:

- a) Pemerintah Daerah yang sumber dananya berasal dari APBD
- b) Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:
 - (1) Perusahaan Perseroan; dan
 - (2) Perusahaan Umum.

3. Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat (SAPP)

- a. Menjaga aset Pemerintah Pusat dan instansi-instansinya melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar dan praktik akuntansi yang diterima secara umum.
- b. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan kegiatan keuangan Pemerintah Pusat, baik secara nasional maupun instansi yang berguna sebagai dasar penilaian kinerja, untuk menentukan ketaatan terhadap otorisasi anggaran dan untuk tujuan akuntabilitas.
- c. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan
- d. Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien

4. Ciri-ciri khusus Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat

SAPP memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. Basis Akuntansi

Cash Toward Accrual. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

b. Sistem Pembukuan Berpasangan

Sistem Pembukuan Berpasangan didasarkan atas persamaan dasar akuntansi yaitu Aset Kewajiban Ekuitas Dana. Setiap transaksi dibukukan dengan mendebet sebuah perkiraan dan mengkredit perkiraan yang terkait.

c. Desentralisasi Pelaksanaan Akuntansi

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan di instansi dilaksanakan secara berjenjang oleh unit-unit akuntansi baik di kantor pusat instansi maupun di daerah.

d. Bagan Akun Standar

SAPP menggunakan akun standar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku untuk tujuan penganggaran maupun akuntansi.

e. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

SAPP mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam melakukan pengakuan, penilaian, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan terhadap transaksi keuangan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan anggaran, pertanggungjawaban, akuntansi, dan pelaporan keuangan.

5. Rerangka Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan Pusat

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari:

a. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara

Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). SA-BUN terdiri dari beberapa subsistem, yaitu:

1. Sistem Akuntansi Pusat (SIAP), terdiri dari:
 - Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN)
 - Sistem Akuntansi Umum (SAU)
2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H)
3. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP)
4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP)
5. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD)
6. Sistem Akuntansi Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (SA-BAPP)
7. Sistem Akuntansi transaksi khusus
8. Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL)

b. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga Kementerian Negara/Lembaga melakukan pemrosesan data untuk menghasilkan Laporan Keuangan. Dalam pelaksanaan SAI, Kementerian Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi keuangan dan unit akuntansi barang.

6. Jenis-Jenis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK.

Komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari:

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
2. Laporan Finansial yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Adapun Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan-laporan tersebut dijelaskan sebagai berikut :

6.1. Laporan Realisasi Anggaran

- Pengertian

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode tertentu.

- Manfaat

Berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan satker pemerintah pusat dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif

- Struktur dan isi Laporan Realisasi Anggaran dapat dilihat di Standar Akuntansi Pemerintahan.

6.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh

Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

Isi dan format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dapat dilihat pada Standar Akuntansi Pemerintahan

6.3. Neraca

- Definisi

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- Manfaat

Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas satker pemerintah pusat/daerah pada tanggal tertentu.

- Isi dan Struktur neraca dapat dilihat di Standar Akuntansi Pemerintahan

6.4. Laporan Operasional

- Definisi

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Tujuan

LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

- Isi dan Struktur laporan operasional dapat dilihat pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

6.5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas (LAK) adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Tujuan LAK untuk memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK wajib disusun dan disajikan hanya oleh unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Format laporan arus kas dapat dilihat pada Standar Akuntansi Pemerintahan.

6.6. Laporan Perubahan Ekuitas

- Definisi
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
- Tujuan
LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- Isi dan Struktur laporan perubahan ekuitas dapat dilihat pada Standar Akuntansi Pemerintahan

6.7. Catatan Atas Laporan Keuangan

- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan oleh

karenanya setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan.

- CaLK meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen komitmen lainnya.
- CaLK bertujuan untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.
- Isi dan format CaLK dapat dilihat di Standar Akuntansi Pemerintahan

c. Rangkuman

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terbagi menjadi 2 subsistem yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk Kementerian/Lembaga dan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk Bendahara Umum Negara. Menteri Keuangan menjalankan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara sekaligus sebagai Pengelola Kas Negara.

Sistem akuntansi pemerintah pusat (SAPP) adalah serangkaian prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat.

Ruang lingkup SAPP adalah pemerintah pusat (dalam hal ini lembaga tinggi Negara dan lembaga eksekutif) serta pemda yang mendapatkan dana dari APBN (terkait dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan) sehingga tidak dapat diterapkan untuk lingkungan pemda atau lembaga keuangan Negara.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disampaikan kepada DPR sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN. Sebelum disampaikan kepada DPR, LKPP tersebut diaudit oleh BPK. Komponen LKPP berbasis akrual terdiri dari:

- a. Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.
- b. Laporan Finansial yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas, Adapun Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Catatan atas Laporan Keuangan.

d. Tugas

Silahkan mereview artikel tentang akuntansi pemerintah pusat. Review dilakukan dengan menggunakan pola yang umum dilakukan yaitu jelaskan tentang: latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, objek penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, simpulan penelitian, kelebihan dan kekurangan penelitian.

e. Tes Formatif

1. Apa yang dimaksud dengan sistem akuntansi pemerintah pusat?
2. Apa saja dasar hukum pemerintah akuntansi pemerintahan pusat?

3. Ciri-ciri pokok sistem akuntansi pemerintah pusat itu bagaimana?
4. Mengapa pemerintah pusat memerlukan sistem akuntansi pemerintahan pusat?

f. Kunci Jawaban

1. Akuntansi pemerintah pusat adalah sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual dengan proses elektrolisis dalam pengambilan data, pembukuan, , aset utang dan ekuitas seluruh entitas pemerintah pusat.
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 51: Menteri/ Pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, Aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja.
3. Ciri-ciri sistem akuntansi pemerintahan pusat: perkiraan standar yang seragam meningkatkan kemampuan sistem akuntansi untuk memberikan informasi/laporan yang relevan, berarti, dan. memungkinkan perbandingan data laporan keuangan, baik dalam suatu laporan maupun antar laporan.
4. Agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka perlu diselenggarakan sistem akuntansi pemerintah pusat yang terdiri dari sistem akuntansi bendahara umum negara (SA-BUN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan sistem akuntansi instansi yang dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga lainnya.

Kegiatan Belajar 14

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami Praktek Akuntansi Keuangan Daerah

b. Uraian Materi

1. Seluk Beluk Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari pemerintah daerah (Kabupaten, Kota atau Provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan.

Untuk menyelenggarakan akuntansi pemerintah daerah, kepala daerah menetapkan sistem akuntansi pemerintahan daerah dengan mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Sistem akuntansi pemerintahan daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian intern dan standar akuntansi pemerintahan.

Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas

Mengacu pada peraturan perundang-undangan, sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh:

1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPKSKPD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

2. Sistem Pencatatan Akuntansi Keuangan Daerah

2.1. Single Entry

Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau tata buku. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran. Berdasarkan Pemendagri Nomor 13 tahun 2006, Sistem Pencatatan *Single Entry* ini dilakukan oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik di level SKPD maupun SKPKD. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan yaitu sederhana dan mudah dipahami, namun kelemahannya kurang bagus untuk pelaporan dan sulit untuk dikontrol.

2.2. Double Entry

Sistem pencatatan ini sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali (*double* = Berpasangan/Ganda, *entry* = Pencatatan). Pencatatan dengan sistem ini dikenal dengan istilah menjurnal, pencatatan tersebut terdapat sisi debit dan kredit dan dalam pencatatan tersebut harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi.

2.3. Triple Entry

Pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry* ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi sementara sistem pencatatan *double entry* dijalankan, PPK OPD maupun apa bagian keuangan atau akuntansi pada satuan kerja pengelolaan kekayaan daerah juga mencatat transaksi tersebut ke dalam buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran.

3. Dasar Akuntansi

- a. Basis Kas (*Cash Basic*), menetapkan pengakuan atau pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi tersebut tidak dicatat.
- b. Basis Akrual (*Accrual Basic*), Dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi (dan bukan hanya pada saat kas dan setara kas diterima atau dibayar). Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan periode terjadinya.
- c. Basis Kas Modifikasi, Kombinasi dasar kas dengan akrual. Transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas dibukukan pada saat uang diterima atau dibayar.
- d. Basis Akrual Modifikasian, Mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.

4. Akuntansi Keuangan Organisasi Perangkat Daerah

Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, satuan kerja merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu:

1. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
2. Organisasi Pengelola Keuangan Daerah (OPKD)

Kegiatan akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meliputi pencatatan atas:

- Pendapatan
- Belanja
- Aset, dan
- Selain Kas.

Proses pencatatan akuntansi pada OPD tersebut dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD) berdasarkan dokumen-dokumen sumber dari bendahara dan Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD). PPK-OPD melakukan pencatatan transaksi pendapatan pada jurnal penerimaan kas, transaksi belanja pada jurnal pengeluaran kas belanja serta transaksi aset dan selain kas pada jurnal umum.

Secara berkala, PPK-OPD melakukan posting pada buku besar dan secara periodik menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan Laporan Keuangan, yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Istilah saat ini adalah OPD, yang sebelumnya dikenal dengan istilah SKPD yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5. Karakteristik Laporan Keuangan

- a. Relevan. Informasi dalam Laporan Keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini dan masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu.
- b. Andal. Laporan Keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap kenyataan secara jujur serta dapat diverifikasi.
- c. Dapat dibandingkan. Laporan Keuangan dapat menjadi lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan

periode sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah daerah lain pada umumnya.

- d. Dapat dipahami. Laporan Keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan, dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan.

Dalam prakteknya, LKPD disusun terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Laporan Keuangan yang disusun oleh OPD selaku entitas pelaporan
- b. Laporan Keuangan yang disusun oleh PPKD selaku entitas akuntansi
- c. Laporan Keuangan Konsolidasi/Gabungan yang mencerminkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara utuh

Pada fungsi OPD selaku entitas pelaporan, yang perlu disiapkan oleh SKPD dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) OPD;
- b. Neraca OPD,
- c. Laporan Operasional (LO) OPD;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) OPD.

6. Langkah-Langkah Praktik Keuangan

- a. Transaksi pemerintahan daerah Transaksi yang terjadi dan diikuti oleh bukti-bukti yang sah.
- b. Pencatatan dalam jurnal Catatan akuntansi terdiri dari beberapa macam jurnal, yaitu:

a) Jurnal Penerimaan Kas

Buku Jurnal Penerimaan Kas merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi

atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya penerimaan kas. Contohnya adalah penerimaan kas dari pinjaman.

Data yang dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal ini adalah:

- Tanggal transaksi atau kejadian keuangan, dicatat secara urut tanggal (kronologis).
- Jurnal Kas yang diterima, dalam bentuk uang, bukan barang.
- Obyek Penerimaan kas, yaitu obyek yang menyebabkan terjadinya penerimaan kas.

b) Jurnal Standar

Transaksi atau kejadian yang mengakibatkan penerimaan kas umumnya berupa:

- Penerimaan Kas dari pendapatan asli daerah.
- Penerimaan kas dari penerimaan dana perimbangan.
- Penerimaan Kas dari lain-lain pendapatan yang sah.
- Penerimaan Kas dari pinjaman.
- Penerimaan Kas dari tagihan piutang. Untuk mencatat dan menggolongkan transaksi kejadian tersebut, jurnal standar penerimaan kas adalah:

Debit: Kas

Kredit: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pembiayaan:

- Penerimaan Pinjaman.
- Penerimaan Piutang.

c) Jurnal Pengeluaran Kas

Jurnal Pengeluaran Kas memberikan makna bahwa kas dikredit dan rekening yang terdapat dalam jurnal

pengeluaran kas pada tanggal terjadinya transaksi. Buku Jurnal Pengeluaran Kas merupakan buku yang digunakan untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian yang mengakibatkan terjadinya pengeluaran kas, misalnya adalah pengeluaran kas untuk belanja.

Seperti halnya Jurnal Penerimaan Kas, transaksi pengeluaran kas juga terjadi berulang kali. Data yang dicatat dan digolongkan dalam buku jurnal ini minimal adalah:

- Tanggal Transaksi atau Kejadian Keuangan
- Jumlah Kas yang Diterima
- Obyek Pengeluaran Kas

d) Jurnal Standar

Transaksi atau kejadian yang mengakibatkan pengeluaran kas antara lain:

- Pengeluaran Kas untuk belanja administrasi umum
- Pengeluaran Kas untuk belanja operasi
- Pengeluaran Kas untuk belanja modal aparatur
- Pengeluaran Kas untuk belanja modal publik
- Pengeluaran Kas untuk belanja transfer
- Pengeluaran Kas untuk belanja tidak tersangka
- Pengeluaran Kas untuk pembayaran hutang pokok
- Pengeluaran Kas untuk penyertaan modal Untuk mencatat dan menggolongkan transaksi atau kejadian tersebut,

e) Jurnal Umum

Kedua jurnal diatas merupakan jurnal yang digunakan hanya untuk transaksi yang melibatkan Kas Daerah. Untuk

transaksi yang tidak melibatkan Kas Daerah, dicatat dalam satu buku jurnal yang lain yaitu Buku Jurnal Umum.

f) Posting ke Buku Besar

Transaksi yang telah dicatat dalam buku jurnal kemudian akan diringkaskan dalam buku besar. Proses peringkasan atau pemindahan akun/ rekening ke buku besar disebut dengan posting. Buku besar pada dasarnya terdiri dari sekumpulan rekening yang digunakan untuk menampung nama rekening yang telah dicatat dan digolongkan dalam Buku jurnal.

Jenis dan macam buku besar menyesuaikan dengan kelompok rekening dalam struktur APBD yang baru, yaitu:

- a. Buku besar pendapatan
- b. Buku besar belanja
- c. Buku besar aktiva
- d. Buku besar ekuitas dana

c. Rangkuman

Akuntansi keuangan daerah adalah proses akuntansi yang terjadi di suatu instansi pemerintah daerah seperti kabupaten, kota ataupun provinsi yang meliputi proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan serta pelaporan yang bertujuan untuk pengambilan kebijakan ekonomi oleh pihak internal maupun eksternal.

Dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran transaksi ekonomi harus dinyatakan dalam nilai mata uang rupiah. Pencatatan transaksi dan pengolahan data tentunya membutuhkan berbagai informasi penting.

Informasi ini nantinya akan dijadikan acuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Output yang digunakan dalam laporan

keuangan pemerintah daerah diantaranya, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Neraca, Laporan Arus kas, serta Catatan dan Laporan Keuangan.

Siklus akuntansi keuangan daerah hampir sama dengan siklus akuntansi pada umumnya. Yang membedakan hanyalah pada alurnya saja. Alur pada akuntansi keuangan daerah setelah penyusunan Neraca Saldo Setelah Penyesuaian maka dapat langsung dibuat Laporan Perhitungan APBD. Setelah itu akan dilakukan Penutupan Jurnal dan langsung dibuat Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal Rugi Laba Pemda, dan Neraca.

d. Tugas

Silahkan mereview artikel tentang akuntansi pemerintah daerah. Review dilakukan dengan menggunakan pola yang umum dilakukan yaitu jelaskan tentang: latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, objek penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, simpulan penelitian, kelebihan dan kekurangan penelitian.

e. Tes Formatif

1. Apa yang dimaksud dengan akuntansi keuangan daerah?
2. Bagaimana sistem pencatatan keuangan daerah?
3. Transaksi apa saja yang ada pada akuntansi keuangan daerah?
Jelaskan!
4. Apa perbedaan siklus akuntansi keuangan daerah dan siklus akuntansi pada umumnya?

f. Kunci Jawaban

1. Akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai suatu proses identifikasi pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Dalam sistem akuntansi keuangan daerah, terdapat tiga metode pencatatan, yaitu *single entry*, *double entry*, dan *triple entry*. Oleh karena itu, metode *double entry* untuk menutup kelemahan dari *single entry*.
3. Jenis transaksi meliputi: pendapatan dana perimbangan, belanja, subsidi, hibah, bantu, belanja, bantu, dan bahan, termasuk transaksi-transaksi pembiayaan, pencatatan investasi, dan utang jangka panjang.
4. Siklus akuntansi keuangan daerah sejatinya sama dengan siklus akuntansi pada umumnya. Perbedaannya terdapat dilangkah atau alurnya. Pada akuntansi keuangan daerah, setelah menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dapat langsung dibuatkan laporan perhitungan APBD.

Kegiatan Belajar 15

AKUNTANSI ORGANISASI NIRLABA

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

- Mahasiswa mampu memahami Akuntansi Organisasi Nirlaba
- Mahasiswa mampu menjelaskan Akuntansi Organisasi Nirlaba

b. Uraian Materi

1. SELUK BELUK ORGANISASI NIRLABA

Organisasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Organisasi adanya didirikan karena kesamaan kepentingan, baik dalam rangka untuk mewujudkan hakikat kemanusiaan maupun secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan. Organisasi yang berorientasi atau memiliki tujuan yang bersifat laba maupun non laba selalu berusaha untuk mencapai tujuannya. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul dan bekerja sama secara rasional dan sistematis untuk mencapai tujuan yang telah dibuat atau ditetapkan.

1.1. Pengertian Organisasi

Organisasi merupakan sekelompok manusia yang bekerja sama dalam melakukan kegiatan yang dibimbing oleh seorang pemimpin dalam upaya mencapai tujuannya. Entitas nirlaba merupakan entitas yang bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Entitas nirlaba ini biasanya didirikan oleh masyarakat atau dikelola oleh swasta. Sumber dana yang didapat oleh entitas nirlaba biasanya berasal dari para donator atau penyumbang yang tidak mengharapkan imbal balik atas dana yang diberikan.

1.2. Pengertian Organisasi Nirlaba

Organisasi nirlaba merupakan organisasi yang tidak mencari laba, seperti organisasi keagamaan, yayasan atau lembaga pendidikan. Organisasi nirlaba pada umumnya memilih pemimpin, pengurus atau penanggungjawab yang menerima amanat dari para *stakeholder*-nya. Terkait dengan konsep akuntabilitas dimana akuntansi sebagai sarana pertanggungjawaban akuntabilitas maka laporan keuangan perlu disajikan oleh organisasi nirlaba.

Alasannya karena dengan laporan keuangan maka dapat menilai pertanggungjawaban dari pengurus/manajemen atas tugas, kewajiban dan kinerja yang diamanatkan kepadanya. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba telah diterbitkan pada tanggal 23 Desember 1997 dan kemudian direvisi pada tanggal 8 April 2011. PSAK 45 menjadi rujukan utama lembaga yang tidak berorientasi laba seperti Yayasan dalam penyajian laporan keuangan.

Namun mulai tahun 2019, PSAK 45 diganti dengan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Dengan keluarnya peraturan baru ini maka organisasi nirlaba menyusun laporan keuangannya sesuai dengan ISAK 35. Tapi munculnya peraturan baru ini, terasa sulit untuk diterapkan oleh organisasi nirlaba karena banyak organisasi nirlaba yang tidak memiliki latar belakang ilmu akuntansi sehingga sulit untuk melaksanakannya.

1.3. Karakteristik Organisasi Nirlaba

Karakteristik organisasi nirlaba ini berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan yang paling mendasar terletak pada cara organisasi ini mendapatkan sumber dana yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau pengembalian manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012).

Menurut PSAK 45 jenis laporan keuangan entitas nirlaba terdiri dari 4 jenis yaitu Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Menurut ruang lingkup PSAK 45 organisasi non profit/nirlaba memiliki ciri-ciri seperti berikut:

- a. Sumber daya utamanya berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan laba atau keuntungan yang sebanding dengan sumber daya yang mereka dikorbankan.
- b. Organisasi tersebut mampu menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk menuntut laba atau keuntungan. Jika entitas menghasilkan laba maka nominalnya tidak akan pernah dibagikan kepada penyumbang atau pemilik entitas.
- c. Di organisasi ini tidak ada kepemilikan yang jelas seperti organisasi lain. Artinya dalam organisasi non profit ini tidak dapat dijual, dialihkan atau dikembalikan sumbangannya.

1.4. Organisasi Nirlaba di Indonesia

a. Yayasan

Dasar landasan hukum yayasan dalam perundang-undangan adalah UU No 28 Tahun 2004 yang mendefinisikan yayasan sebagai organisasi yang didirikan berdasarkan pembagian aset. Maksudnya, organisasi ini ditujukan untuk mencapai suatu tujuan dalam bidang sosial, bidang keagamaan, atau bidang kemanusiaan lainnya yang dapat membantu masyarakat. Yayasan memiliki ciri khas yaitu kepemilikannya yang eksklusif.

b. Lembaga Perkumpulan (Asosiasi)

Lembaga asosiasi seringkali didefinisikan sebagai suatu organisasi yang berbasis anggotanya dan dibentuk karena adanya tujuan yang ada diantara para anggotanya yang tergabung. Asosiasi dibedakan menjadi dua yaitu asosiasi gabungan dengan memiliki hukum dan asosiasi biasa yang tidak memiliki hukum. Jika ada lembaga asosiasi yang ingin

mendapatkan perlindungan hukum, lembaga tersebut harus mempersiapkan surat pendaftaran. Surat pendaftaran ini nantinya akan diajukan ke ketua pengadilan negeri. Setelah surat pendaftarannya disetujui dan disahkan oleh pengadilan distrik, maka akan keluar surat perlindungan hukum dari Departemen Hukum dan HAM.

c. Institut

Institut adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, bidang sosial, budaya, dan humaniora. Organisasi ini memiliki tujuan yang sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Contoh institusi adalah sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, lembaga kursus belajar, institute pelatihan kerja dan sebagainya.

Dari ketiga contoh lembaga organisasi nirlaba tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan sebenarnya didirikannya organisasi nirlaba adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Dilihat dari bentuk penyajian organisasinya yang membantu dalam melayani masyarakat, mencerdaskan anak bangsa dan memberikan kebebasan bagi masyarakat. Meskipun membutuhkan waktu yang lama untuk mendirikan lembaga nirlaba, tapi manfaatnya sangat luar biasa.

2. LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA

Organisasi nirlaba memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan organisasi yang berorientasi laba. Dalam menjalankan kegiatannya, organisasi nirlaba tidak semata-mata digerakkan oleh tujuan untuk mencari laba. Meskipun demikian *non-for-profit* juga harus diartikan sebagai *not-for-loss*. Oleh karena itu, organisasi nirlaba selayaknya pun tidak mengalami defisit. Adapun bila organisasi nirlaba memperoleh surplus, maka surplus tersebut akan dikembalikan kembali untuk pemenuhan kepentingan publik, dan bukan untuk memperkaya pemilik organisasi nirlaba tersebut.

2.1. Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai:

- Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan
- Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.

b. Laporan Aktivitas

Tujuan utama laporan aktivitas adalah menyediakan informasi mengenai:

- Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih.
- Hubungan antar transaksi, dan peristiwa lain.
- Bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau jasa, Informasi dalam laporan aktivitas, yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak lainnya.

c. Laporan Arus Kas

Tujuan utama laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan bagian dari laporan keuangan yang tak terpisahkan karena berisikan penjelasan-penjelasan rinci atas akun-akun dalam laporan keuangan. Organisasi nirlaba menggunakan basis akuntansi akrual untuk mengakui pendapatan dan bebannya.

2.2. Tujuan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba

- a. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba.
- b. Pihak pengguna laporan keuangan organisasi nirlaba memiliki kepentingan bersama dalam rangka menilai:
 - Jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.
 - Cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya dan aspek lain dari kinerja mereka.

3. Organisasi Nirlaba - Contoh Kasus

Masjid merupakan salah satu organisasi nirlaba dalam bidang keagamaan, sesuai dengan PSAK 45 tahun 2011 tentang Organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba juga harus dan berhak untuk membuat laporan keuangan dan melaporkan kepada para pemakai laporan keuangan. Masjid harus membuat laporan keuangan yang akurat dan memberikan informasinya kepada pengguna laporan keuangan tersebut yaitu para donatur masjid. Namun PSAK 45 telah dicabut sehingga acuan untuk penyusunan laporan keuangan organisasi nirlaba mengacu ke ISAK 35.

Untuk dapat membuat laporan keuangan dana masjid dengan akurat dibutuhkan penerapan akuntansi, dan peranan akuntansi disini adalah memperlancar manajemen keuangan dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, pengawasan dan pengambilan keputusan. Pencatatan keuangan masjid biasanya hanya mencakup penerimaan dan pengeluaran kas masjid saja tanpa memperlihatkan jumlah aset yang dimiliki oleh masjid dan berapa nilainya, sehingga banyak kasus hilangnya aset masjid karena kelemahan sistem pencatatan laporan keuangan.

Masjid merupakan lembaga milik publik yang kepemilikan hartanya merupakan milik umat yang dititipkan kepada para pengelolanya (ta'mir). Organisasi masjid merupakan organisasi nirlaba, yaitu dalam menjalankan usaha tidak mencari laba, namun semata-mata hanya untuk melayani kepentingan umat. Modal yang dimiliki oleh masjid biasanya juga cukup besar, terdapat sebidang tanah dan nilai bangunan, juga peralatan dan perlengkapan yang ada di dalam masjid.

Sumber pendapatan masjid biasanya terdiri dari Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Waqof dan sumber pengeluaran masjid terdiri dari biaya rutin (listrik,air), biaya kebersihan,biaya kegiatan Islami yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperingati harihari besar Islam Maulid Nabi SAW, safari Ramadhan, dan lain sebagainya, dana perbaikan peralatan masjid dll. Takmir menjalankan perannya berdasarkan kepercayaan umat, maka laporan keuangan yang merupakan bentuk pertanggung jawaban para pengurus masjid atau takmir sangat diperlukan untuk memenuhi kepercayaan yang telah diberikan.

4. Bentuk Pengelolaan Keuangan Pada Lembaga Masjid

Pada penerapannya, akuntansi masjid lebih menggunakan metode pencatatan *cash basis* yakni mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayarkan. Dengan metode *cash basis* tingkat efisiensi dan efektifitas suatu kegiatan, program atau aktifitas tidak dapat diukur dengan baik. Akuntansi dengan *accrual basis* dianggap lebih baik daripada

cash basis karena dianggap menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan.

Selain itu, akuntansi masjid menggunakan metode pembukuan tunggal (*single entry method*) dengan alasan lebih praktis dan mudah. Penggunaan *single entry method* tidak lagi tepat untuk diterapkan karena tidak dapat memberikan informasi yang komprehensif, maka penggunaan *single entry method* dengan alasan kemudahan dan kepraktisan menjadi tidak relevan lagi. Sistem pelaporan keuangan pada masjid masih berbentuk format biasa yang sesuai dengan pemahaman mereka. Biasanya hanya berupa pencatatan kas masuk dan kas keluar.

Pelaporan keuangan itu sendiri dibuat untuk proses pertanggungjawaban kepada para jama'ah masjid sebagai suatu sifat keterbukaan dan transparansinya suatu laporan keuangan. Berikut Penyajian Laporan Keuangan baik laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan dapat dilihat pada ISAK 35.

c. Rangkuman

Organisasi Nirlaba adalah organisasi yang didirikan untuk kesejahteraan masyarakat atau untuk Organisasi nonprofit beroperasi untuk memenuhi tujuan amal, pendidikan, agama, atau ilmiah, daripada untuk mendapatkan keuntungan. Ini biasanya didirikan sebagai lembaga amal dengan motif pelayanan. Para pengurus yayasan mengelola organisasi ini. Anggota organisasi juga memilih pengawas dan anggota, Organisasi Nirlaba mengumpulkan dana dari anggotanya serta dari masyarakat umum untuk memenuhi tujuan mereka.

Meskipun lembaga nonprofit memang membutuhkan pendapatan untuk beroperasi, mendapatkan keuntungan bukanlah fungsi utama mereka. Dengan demikian, mereka tidak perlu mempersiapkan laporan

laba rugi yang berhubungan dengan penjualan. Organisasi mengkredit dana yang diterima ke Dana Modal atau Dana Umum.

Organisasi-organisasi ini memiliki motif untuk memberikan layanan kepada anggotanya atau kelompok tertentu atau kepada masyarakat umum. Mereka menyediakan layanan gratis atau dengan harga minimum karena tujuan mereka bukanlah untuk mendapatkan keuntungan. Mereka tidak membedakan orang atas dasar kasta, keyakinan, atau warna kulit. Contoh layanan yang diberikan oleh mereka adalah pendidikan, makanan, perawatan kesehatan, rekreasi, fasilitas olah raga, sandang, papan, dan lain-lain

Berikut ciri-ciri dan Standar Akuntansi pada perusahaan nirlaba. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari para anggotanya sendiri atau dari orang lain, tanpa mengharapkan imbalan apapun dari organisasi. Dalam organisasi bisa timbul transaksi tertentu yang tidak pernah terjadi dalam organisasi bisnis.

Perbedaannya terletak pada cara organisasi tersebut memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Sumbangan yang terikat dan tidak terikat dihitung pada nilai wajarnya dan diakui sebagai pendapatan atau keuntungan. Pada periode diterimanya, atau beban, dan aktiva dalam 3 kelompok aktiva bersih seperti yang meningkatkan aktiva bersih tidak terikat, yang meningkatkan aktiva bersih, dan yang meningkatkan aktiva bersih terikat permanen.

d. Tugas

Silahkan mereview artikel tentang akuntansi organisasi nirlaba. Review dilakukan dengan menggunakan pola yang umum dilakukan yaitu jelaskan tentang: latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, objek penelitian, metode yang digunakan, hasil penelitian, simpulan penelitian, kelebihan dan kekurangan penelitian.

e. Tes Formatif

1. Apa itu artinya nirlaba?
2. Mengapa organisasi membutuhkan akuntansi?
3. Siapa saja pengguna dari laporan keuangan organisasi nirlaba?
4. Apakah organisasi nirlaba harus membuat laporan keuangan?
Jelaskan!

f. Kunci Jawaban

1. Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi atau instansi yang saat beroperasi tidak mencari laba atau keuntungan dalam artian lembaga nirlaba ini adalah kumpulan dari beberapa orang yang bertujuan sama dalam mencapai suatu tujuan yang mulia.
2. Untuk menghitung nilai aset, liabilitas dan nilai asset bersih yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Hal dimaksudkan agar setelah periode tertentu dapat ditentukan Apakah kegiatan organisasi nirlaba tersebut mendapatkan saldo lebih atau defisit. Akuntansi juga diperlukan untuk pertanggungjawaban kepada stakeholder.
3. Laporan organisasi nirlaba ini dibutuhkan sebagai informasi akuntansi bagi para pengguna baik pihak internal maupun eksternal seperti donator, yayasan, kreditur, anggota organisasi dan pihak lain untuk pengambilan keputusan.
4. Organisasi nirlaba juga perlu membuat laporan karena laporan tersebut akan memberikan informasi tentang kondisi keuangan selama periode waktu tertentu. Oleh karena itu, organisasi nirlaba juga membutuhkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi untuk organisasi nirlaba.

Kegiatan Belajar 16

UJIAN AKHIR SEMESTER

a. Tujuan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan belajar yang ke enam belas ini adalah evaluasi belajar akhir semester.

b. Uraian Materi

1. Petunjuk Ujian Akhir Semester

- d. Siapkan lembar jawaban dengan menggunakan kerta bergaris folio.
- e. Tulis identitas Anda di pojok kiri atas, yaitu: 1). Nomor Urut Absen, 2). Nama Mahasiswa, 3). Nomor Induk Mahasiswa, 4). Mata Kuliah dan kelas.
- f. Tulis Tanggal Ujian di pojok kanan atas.

2. Soal Ujian Akhir Semester

Jawab Pertanyaan berikut:

- 1. Jelaskan konsep, tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik!
- 2. Jelaskan perbedaan antara laporan keuangan sektor publik dan laporan keuangan private!
- 3. Apa dampak laporan keuangan sektor publik jika laporan keuangan yang dihasilkan “buruk”?
- 4. Sebutkan manfaat dan tujuan pengukuran kinerja sektor publik!
- 5. Jelaskan informasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengukur kinerja sektor publik!
- 6. Jelaskan azas-azas pengelolaan keuangan desa!
- 7. Sebutkan tujuan sistem akuntansi pemerintah pusat!
- 8. Sebutkan dan jelaskan apa saja laporan keuangan pemerintah pusat!
- 9. Jelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah!
- 10. Apa perbedaan mendasar antara laporan keuangan pemerintah dan laporan keuangan organisasi nirlaba?

c. Rangkuman

Evaluasi ini meliputi materi setelah Ujian Tengah Semester (UTS) yaitu materi pertemuan ke-9 (sembilan) sampai dengan pertemuan ke-15 (lima belas).

d. Tugas

Harap mengumpulkan tugas paper yang telah disampaikan sebelumnya.

BAB 3

EVALUASI DAN PENUTUP

a. Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan memperhatikan kognitif skill mahasiswa selama proses pembelajaran tanpa mengabaikan aspek psikomotor skill dan attitude skill. Pertimbangan yang dipakai selama proses pembelajaran adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi di kelas, ketepatan mengumpulkan tugas dan kemampuan menjelaskan pendapatnya. Selain itu sikap dan perilaku mahasiswa juga dinilai dari perilaku mereka ketika berkeinginan mengemukakan pendapatnya.

Kemampuan mahasiswa dalam melakukan review artikel juga dipertimbangkan dalam evaluasi ini. Hasil review artikel ini terlihat apakah mahasiswa menguasai suatu topik bahasan. Artinya mahasiswa telah membaca secara teoretis dan mengerti kondisi lapangan yang terjadi.

Kemampuan mahasiswa membaca laporan keuangan sektor publik menjadi pertimbangan utama dalam evaluasi ini, karena tujuan utama pembelajaran ini adalah memahami laporan keuangan pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Selain itu kemampuan menjelaskan laporan keuangan pemerintah desa dan organisasi sektor publik juga diperlukan.

b. Penutup

Melalui pembelajaran berbasis modul, diharapkan akan membantu mahasiswa akan dapat belajar secara mandiri, mengukur kemampuan diri sendiri, dan menilai dirinya sendiri. Tidak terkecuali dalam memahami konsep penyusunan laporan keuangan sektor publik, khususnya laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Semoga modul ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam proses pembelajaran pada kegiatan perkuliahan, baik teori maupun praktik. Mahasiswa lebih mendalami materi lain di samping materi yang ada di modul ini melalui berbagai sumber, jurnal, maupun internet.

Semoga modul ini bermanfaat bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi, khususnya yang mengambil konsentrasi Akuntansi Sektor Publik. Tak lupa dalam kesempatan ini, penulis mohon saran dan kritik yang membangun, demi sempurnanya penyusunan modul ini di masa-masa yang akan datang. Semoga modul ini memberikan manfaat bagi mahasiswa dan pembaca lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2013. Teori, Konsep, dan Aplikasi, Akuntansi Sektor Publik, Dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan, Dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah. Salemba Empat. Jakarta.
- Abdul Halim, 2014. *Manajemen Keuangan Publik Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. Salemba Empat, Jakarta
- Ardi Hamzah, 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera Dan Partisipatoris*. Penerbit Pustaka, Surabaya.
- Badric Siregar dan Bonni Siregar, 2007. Akuntansi Pemerintahan Dengan Sistem Dana. Bagain Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, YKPN. Yogyakarta.
- Chiata O, Muhammad FK dan Iasha Natitie AR, 2019. Perkembangan Sistem dan Teknik Penganggaran Sektor Publik Berbasis Kinerja, Jurnal Sikap, Vol 4 Nomor 1, Hal 21-28.
- Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006. Standar Akuntansi Pemerintahan, Telaah Kritis PP No.24 Tahun 2005. BPFE, Yogyakarta.
- Handayani, Monika. Akuntansi Sektor Publik: Dilengkapi 100 Soal Latihan Dan Jawaban. POLIBAN PRESS, 2019.
- Hassel Nogi S. Tangkilisan, 2003. Manajemen Modern Untuk Sektor Publik, Strategic Management, Total uality Management, Balance Scorecard, Scenarion Planing. Balirung, Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2018. Standar Akuntansi Keuangan, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45. Dewan Standar Akuntansi Kuangan Ikatan Akuntan Indoensia. Jakarta.
- Ikhwan Fahrojih, 2016. Pengawasan Keuangan Negara, Pemeriksaan Keuangan Negara Melalui Auditor Internal dan Eksternal Serta DPR. Intras Publishing, Malang.
- Indra Bastian. 2007. Akuntansi Untuk LSM dan Partai Politik, Erlangga, Jakarta.

- Indra Bastian, 2010. Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar, Edisi Ketiga. Erlangga, Jakarta.
- Indra Bastian, 2014. Audit Sektor Publik, Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintah. Edisi 3. Salemba Empat. Jakarta.
- Jati Andrianto dan Gugus Irianto, 2008. Akuntansi dan Kekuasaan: Dalam Konteks Bank BUMN Indonesia. Seri *Political Economy of Accounting* (PEA). FEB Universitas Brawijaya dan Aditya Media Publishing.
- John M Bryson, 1995. Strategic Planning For Public and Nonprofit Organizations, A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, Revised Edition. Jossey-Bass Publishers. San Francisco.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Serial Otonomi Daerah. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2021. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- PP No.17 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. Fokus Media. Bandung.
- PSAK Nomor 45. 2011. (Ikatan Akuntansi Indonesia). Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Ikatan Akuntan Indonesia. Jakarta.
- Sahya Anggara, 2012. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Pustaka Setia, Jakarta
- Sujarweni, V Wiratna, 2015. *Akuntansi Sektor Publik: Teori Konsep Aplikasi*. Pustaka Baru Pres, Yogyakarta.
- Suparmoko. 2000. Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik, Edisi 5, BPFE, Yogyakarta.
- Tony Novaird dan Elke Loffler, 2003. Public Management and Governanve, Routledge. London and New York.
- Yuesti Anik Ni Luh Putu Sandrya Dewi dan I Gusti Ayu Asri Pramesti. 2020. "E-Book Akuntansi Sektor Publik." KARTI. Jakarta